



BIROKRASI INDONESIA

Monica Feronica Bormasa, Ahmad Rosandi Sakir,
Ahmad Mustanir, Nur Rohim Yunus,
Ade Putra Ode Amane, Neng Suryanti Nengsih,
Amtai Alaslan, Sunariyanto

ISBN 978-623-198-360-2



9 786231 983602

BIROKRASI INDONESIA

**Monica Feronica Bormasa
Ahmad Rosandi Sakir
Ahmad Mustanir
Nur Rohim Yunus
Ade Putra Ode Amane
Neng Suryanti Nengsih
Amtai Alaslan
Sunariyanto**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

BIROKRASI INDONESIA

Penulis :

Monica Feronica Bormasa
Ahmad Rosandi Sakir
Ahmad Mustanir
Nur Rohim Yunus
Ade Putra Ode Amane
Neng Suryanti Nengsih
Amtai Alaslan
Sunariyanto

ISBN : 978-623-198-360-2

Editor : Ari Yanto, M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Birokrasi Indonesia ini.

Buku Ini Membahas Pengertian dan pendekatan dalam birokrasi, Persepsi tentang birokrasi, Birokrasi dan politik, Pertanggungjawaban birokrasi, Birokrasi dan aparatur negara, Birokrasi dan otonomi daerah, Kewirausahaan birokrasi, Tantangan masa depan birokrasi pelayanan publik.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGERTIAN DAN PENDEKATAN DALAM BIROKRASI	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian Birokrasi	2
1.3 Karakteristik Birokrasi.....	5
1.4 Prinsip- Prinsip Birokrasi.....	7
1.5 Pendekatan Dalam Birokrasi	10
DAFTAR PUSTAKA.....	12
BAB 2 PERSPEKTIF TENTANG BIROKRASI.....	13
2.1 Pendahuluan.....	13
2.2 Birokrasi Dari Perspektif Politik.....	16
2.3 Konsep, Pemikiran dan Praktik Birokrasi di Indonesia.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	26
BAB 3 BIROKRASI DAN POLITIK.....	27
3.1 Pendahuluan.....	27
3.2 Birokrasi dan Politik.....	34
3.3 Birokrasi dan Politik di Indonesia.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	51
BAB 4 PERTANGGUNGJAWABAN BIROKRASI.....	53
4.1 Pendahuluan.....	53
4.2 Jenis Tanggung Jawab Birokrasi	55
4.3 Mekanisme untuk menjamin akuntabilitas birokrasi	56
4.4 Dampak akuntabilitas birokrasi bagi pelayanan publik.....	58
4.5 Tantangan dalam menjalankan akuntabilitas birokrasi	59
4.6 Penutup	61

DAFTAR PUSTAKA.....	63
BAB 5 BIROKRASI DAN APARATUR NEGARA	65
5.1 Konsep, Dinamika, dan Problematika Reformasi Birokrasi.....	65
5.1.1 Konsep Reformasi Birokrasi	65
5.1.2 Dinamika Reformasi Birokrasi.....	68
5.1.3 Problematika Reformasi Birokrasi.....	68
5.1.4 Indikator Capaian Reformasi Birokrasi.....	70
5.2 Birokrasi Administrasi	71
5.2.1 Tujuan dan Fungsi Birokrasi	72
5.2.2 Ciri-Ciri Birokrasi Administrasi.....	75
5.2.3 Perilaku Birokrasi	77
5.2.4 Dimensi Perubahan Institusi Birokrasi	77
5.3 Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja	78
5.4 Birokrasi Berbasis Human Capital.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	84
BAB 6 BIROKRASI DAN PEMERINTAH DAERAH	87
6.1 Pendahuluan	87
6.2 Makna Birokrasi	88
6.3 Birokrasi Indonesia Zaman Kolonial Hingga Sekarang.....	90
6.4 Reformasi Birokrasi Pemerintahan	94
6.5 Strategi Reformasi Birokrasi Pada Pemerintahan Daerah.....	95
6.6 Cara Birokrasi Bekerja	97
6.7 Tujuan Birokrasi.....	97
6.8 Fungsi Birokrasi	98
6.9 Kendala Dalam Peran Birokrasi Dalam Pemerintahan.....	99
6.10 Kesimpulan	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
BAB 7 KEWIRAUSAHAAN BIROKRASI.....	105
7.1 Pendahuluan	105

7.2 Konsep Kewirausahaan Birokrasi.....	108
7.3 Prinsip-Prinsip Mewirauahakan Birokrasi.....	109
7.4 Strategi Mewirauahakan Birokrasi.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	116
BAB 8 TANTANGAN MASA DEPAN BIROKRASI	
PELAYANAN PUBLIK	117
DAFTAR PUSTAKA.....	122
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENGERTIAN DAN PENDEKATAN

DALAM BIROKRASI

Oleh Monica Feronica Bormasa

1.1 Pendahuluan

Birokrasi adalah salah satu indikator terpenting bagi masyarakat moderen saat ini, di mana kehadirannya tidak mungkin terelakan. Eksistensi birokrasi adalah suatu konsekuensi secara logis dan memiliki tugas utama dalam suatu negara/pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara sampai saat ini dituntut untuk lebih untuk ikut serta dalam menciptakan atau memproduksi barang dan jasa yang menjadi tuntutan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Negara juga bertanggung jawab dalam keadaan apapun untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu negara telah membangun sistem administrasi dengan tujuan memberikan pelayanan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang disebut birokrasi.

Birokrasi dimaknai bagi sebagian orang sebagai suatu prosedur yang berbelit, menyusahakan, proses yang sulit dan menjengkelkan. Tetapi sebagian juga orang memahami birokrasi sebagai prefektif yang positif yaitu sebagai usaha dalam mengatur dan mengendalikan perilaku dari masyarakat untuk lebih tertip. Tertip yang dimaksud adalah tentang mengelola berbagai sumber daya dan distribusi sumber daya tersebut kepada semua orang secara merata atau adil.

Birokrasi adalah suatu sistem pengorganisasian negara dalam tugas yang sangat kompleks, hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa pengendalian dalam operasi manajemen pemerintah yang baik. Tapi sangat disayangkan apabila rutinitas kerja yang dilakukan oleh aparat birokrasi selalu terjadi masalah baru yang menjadikan birokrasi berada di tempat dan tidak peka terhadap pembaruan. Keadaan seperti ini seringkali muncul potensi dari praktik mala administrasi yang lebih terarah pada korupsi, kolusi dan nepotisme. Dari hal tersebut seharusnya pemerintah pusat maupun daerah harus melakukan reformasi birokrasi yang bukan hanya bertujuan pada tataran komitmen tetapi juga pada dalam tataran kehidupan nyata.

1.2 Pengertian Birokrasi

Secara etimologis, istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki asal kata dari kata *Bureau*, yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat dan *Cracy* yang berarti aturan. Birokrasi dari asal kata di atas dapat menjelaskan bahwa birokrasi merupakan organisasi formal yang mana lokasi kerjanya disebut kantor.

Dari asal kata ini maka birokrasi merupakan suatu organisasi formal pada bidang kerja yang ada pada suatu instansi atau kantor. Karena itu birokrasi dapat dipahami sebagai tipe organisasi yang melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan yang bersifat administratif yang melibatkan banyak orang dalam hal koordinasi secara sistematis satu dengan yang lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari istilah Birokrasi setidaknya dimaknai sebagai berikut (Albrow dalam Zauhar, 1996):

1. Birokrasi Sebagai Organisasi Rasional.

Maksud dari pengertian ini adalah sebagai organisasi yang rasional dalam menindaklanjuti setiap kegiatan atau aktivitas dalam organisasi birokrasi harus berpedoman pada aturan organisasi dan dalam pengambilan keputusan lebih mempertimbangkan rasional.

2. Birokrasi Sebagai Aturan.

Birokrasi ini merupakan rangkaian aturan yang harus dilaksanakan oleh para pejabat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan-aturan tersebut dibuat untuk mempermudah berbagai proses dalam pelayanan publik. Tetapi pada kenyataannya banyak para pejabat sering menyalahgunakan aturan tersebut demi kepentingan kelompok dan pribadi. Sehingga mengakibatkan masyarakat antipati terhadap berbagai aturan yang dibuat.

3. Birokrasi sebagai Pemborosan

Pemborosan dalam birokrasi yang disebutkan lebih cenderung mengarah pada pemborosan waktu, tenaga, finansial maupun sumber daya lainnya. Birokrasi sering kali berusaha memberikan pelayanan yang efisien namun sering terjadi hal-hal yang mengakibatkan pelayanan bagi masyarakat tidak efisien dan juga mengecewakan membuat masyarakat merasa apatis terhadap berbagai bentuk slogan yang sering menggambarkan pelayanan organisasi yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini juga menunjukkan bahwa organisasi birokrasi para pejabat birokrasi tidak konsisten dan konsekuen dengan perneytaan sehingga birokrasi dianggap sebagai tempat srang penyakit organisasi moderen seperti pembengkakan

pegawai, biaya tinggi dan sulit beradaptasi dengan lingkungan.

4. Birokrasi sebagai Administrasi Publik.

Birokrasi yang diartikan sebagai administrasi publik merupakan again dari suatu proses kerja sama terhadap pengelolaan sumber daya publik yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya birokrasi adalah suatu unsur dari pelaksanaan administrasi publik untuk dapat mencapai tujuan pelayanan kepada masyarakat secara efisien, efektif dan rasional.

5. Birokrasi sebagai Administrasi

Birokrasi sebagai administrasi adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai untuk mencapai berbagai tujuan dari pada organisasi.

6. Birokrasi sebagai Organisasi.

Birokrasi sebagai organisasi memiliki struktur dan aturan yang sudah ditetapkan secara jelas dan formal. Organisasi merupakan sistem kerja sama yang mengikutsertakan banyak orang, dan setiap orang yang ada pada organisasi memiliki peran dan fungsi serta berbagai tugas yang telah dibagi serta saling mendukung berbagai kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi sebagai sistem kerjasama berarti:

- a. Setiap sistem dalam organisasi mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang telah dirumuskan dengan baik agar semua pegawai dapat bekerja sama mencapai efektivitas.
- b. Sistem dalam penugasan bagi para pegawai disesuaikan dengan keahlian dan kekhususan pada setiap bidang kerja.
- c. Suatu rencana sistem yang harus terbentuk melalui kerja sama dan saling memberikan peran sesuai tugas yang dilaksanakan.

7. Birokrasi merupakan ciri dari masyarakat modern. Setiap masyarakat moderen berlakunya suatu aturan semestinya harus dilaksanakan, karena suatu aturan yang hendak dicapai, dan dilakukan oleh instansi yang formal dan dapat mengendalikan perilaku yang menyimpang terhadap aturan yang telah di buat.

Birokrasi menurut Evers dalam Zauhar (2023:16) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Birokrasi sering mendapat pandangan suatu prosedur yang rasional pada pemerintahan dan aparat administrasi publik.
2. Birokrasi dilihat sebagai organisasi yang memiliki pembengkakan pada jumlah pegawai yang banyak.
3. Birokrasi dipandang sebagai suatu kekuasaan pemerintah yang luas, memiliki tujuan lebih kepada mengontrol kegiatan dari masyarakat

1.3 Karakteristik Birokrasi

Pemahaman birokrasi memiliki keterkaitan dengan organisasi yang rasional dibentuk secara formal sesuai dengan ciri-ciri yang secara spesifik memiliki acuan atau model yang harus dipenuhi. Birokrasi memiliki formalisasi terhadap aturan-aturan yang berlaku, dan struktur birokrasi. Proses yang dijalankan dalam birokrasi adalah suatu cara untuk mencapai tipe birokrasi yang ideal.

Ada beberapa konsep pikir para pakar telah menjelaskan dan memeberikan tentang model birokrasi yang ideal dalam rangka meningkatkan efektivitas administrasi dalam birokrasi organisasi.

Menurut Max Weber fungsi-fungsi sebuah pemerintah itu bisa dijalankan oleh serangkaian struktur-struktur yang

disebutnya *birokrasi*, yang memiliki karakteristik ideal sebagai berikut:

1. Prinsip pembagian kerja

Setiap keegiatan-kegiatan reguler yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasi harus dibagi dalam beberapa cara sebagai tugas –tugas setiap jabatan. Dengan adanya prinsip pembagian kerja yang jelas maka pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga-tenaga kerja yang memiliki spesialisasi pada setiap jabatan, sehingga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan efektif.

2. Struktur hierarkis

Pengorganisasian pada setiap jabatan dapat mengikuti prinsip hirarki, yaitu jabatan yang rendah berada di bawah pengawasan pimpinan yang memiliki jabatan tertinggi, bagi paa pejabat yang memiliki jabatan rendah wajib untuk membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang lebih tinggi.

3. Aturan dan Prosedur

Setiap pelaksanaan kegiatan yang dijalankan harus didasarkan pada sistem peraturan yang telah ditetapkan. Setiap sistem telah memiliki standar masing-masing untuk menjamin berbagai keragaman pelaksanaan tugas dan kegiatan tanpa harus melihat jumlah orang yang terlibat didalamnya.

4. Prinsip netral (*tidak memihak*)

Pejabat yang ada pada birokrasi harus dapat melaksanakan kewajiban dengan semangat, artinya bahwa pejabat harus dapat melakukan tugas dan kewajiban tanpa menggunakan perasaan simpati ataupun tidak simpati dengan maksud bahwa dalam prinsip ini seorang pejabat saat melakukan tugasnya jabatannya tidak harus

menggunakan pertimbangan pribadi atau rasa simpati karena memiliki kedekatan atau hubungan kekeluargaan. Prinsip netral ini menjelaskan bahwa pejabat dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan harus bisa netral atau tidak memihak dalam menilai kinerja dari bawahannya. Agar terciptanya organisasi yang produktif dan efisien.

5. Penempatan didasarkan atas karier

Penetapan kerja dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan harus dilindungi terhadap kinerja pemberhentian bawahan yang sewenang-wenang. Pada organisasi birokrasi penempatan kerja bagi setiap pegawai harus sesuai dengan karir yang dimiliki. Ada berbagai promosi jabatan sering didasarkan pada senioritas atau prestasi ataupun suatu kedudukannya. Kebijakan kepegawaian ini dilakukan dengan maksud agar dapat meningkatkan loyalitas kerja pegawai kepada organisasi sehingga sapat mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

6. Birokrasi murni

Pengalaman kerja pada birokrasi menunjukkan bahwa tipe dari birokrasi yang murni dibentuk dari organisasi, dari segi teknis dilihat dari administrasi untuk dapat memenuhi efisiensi tertinggi dalam organisasi. Mekanisme pada birokrasi berkembang sepenuhnya dilihat pada tingkat efisiensi organisasi tersebut.

1.4 Prinsip- Prinsip Birokrasi

Menurut Sondang P. Siagian, jika terdapat suatu perubahan yang ideal pada birokrasi maka akan semakin baik penyelenggaraan fungsi, tingkat efisien, efektivitas dan produktivitas yang semakin baik, birokrasi pemerintahan harus dapat berusaha lebih baik dalam penyelenggaraannya pada

semua organisasi birokrasi agar dapat dikelola sesuai dengan prinsip organisasi yang sehat.

Ada terdapat prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut:

1. Prinsip Organisasi

Prinsip tersebut menjelaskan bahwa birokrasi sebagai perubahan di bidang kelembagaan harus diterapkan prinsip organisasi yang baik dan dapat diimplemetasikan dan dipahami dengan baik.

2. Prinsip Kejelasan Misi

Birokrasi memiliki misi yang di ambil dari tujuan nasional di berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Birokrasi memiliki serangkaian tugas yang harus diutamakan dan dilaksanakan, yang sifatnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dioperasionalkan secara transparan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang harus memenuhi semua persyaratan secara benar, ramah, cepat dan akurat.

3. Prinsip Kejelasan Fungsi

Prinsip ini ada sebagai suatu perubahan yang mana prinsip kejelasan fungsi merupakan rincian dari misi yang harus dieban pada birokrasi. Prinsip ini juga tidak hanya terbatas pada suatu rumusan tertentu tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi secara fungsional pada setiap instansi. Prinsip kejelasan birokrasi juga memiliki beberapa upaya dalam menjamin birokrasi yaitu:

- a. Pada birokrasi tidak terdapat tumpang tindih dan duplikasi dengan arti bahwa satu fungsi yang diselenggarakan bukan hanya terfokus pada satu instansi namun lebih dari satu.
- b. Tidak terdapat adanya fungsi yang terabaikan karena tidak jelas kedudukannya.

- c. Berusaha menghilangkan persepsi banyak orang adanya fungsi yang kurang penting dalam suatu instansi.
- d. Birokrasi dan masyarakat harus memiliki kejelasan terhadap siapa yang harus menjadi kelompok *clientele* pada suatu instansi.

4. Prinsip Kejelasan Aktivitas

Yang dimaksud dengan aktivitas birokrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan tugas fungsi satuan kerja dalam birokrasi. Prinsip ini harus mendapat perhatian yang terletak pada kenyataan bahwa setiap kali para anggota birokrasi terlihat dalam aktivitas yang mubazir, setiap itu pula terjadi pemborosan. Padahal, karena terbatasnya sarana, prasarana, waktu, dan dana yang tersedia, pemborosan merupakan tindakan yang tidak pernah dapat dibenarkan.

5. Prinsip Kesatuan Arah

Prinsip ini adalah suatu kenyataan bahwa para birokrat sering terlibat dalam berbagai aktivitas, baik itu di dalam birokrasi maupun di luar birokrasi, yaitu aktivitas yang dilakukan pada masyarakat luas yang berkaitan bagi kepentingan pada birokrasi atau instansi pemerintahan.

Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan ini juga ada beberapa kegiatan yang sangat spesialisasi tergantung pada tuntutan dan kepentingan dari pada masyarakat yang dilayani, tetapi ada juga berbagai ragam aktivitas yang dilaksanakan harus lebih difokuskan pada titik kepentingan tersebut yaitu ketercapaian dari setiap tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

6. Prinsip Kesatuan Perintah

Setiap orang yang memiliki wewenang dalam jabatan pemimpin adalah orang yang berhak memberikan perintah pada bawahannya, baik perintah dalam bentuk larangan

atau pun aturan bagi setiap bawahan tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan dalam birokrasi/ instansi tersebut.

1.5 Pendekatan Dalam Birokrasi

Ada terdapat 3 pendekatan dalam birokrasi yaitu:

1. Birokrasi selalu di pandang sebagai suatu prosedur rasionalisme dalam pemerintahan dan aparat dipandang sebagai administrasi publik. (Birokrasi Wabr) pemahaman terhadap pendapat Max Weber sudah dibahas oleh Martin Albrow di mana ia menjelaskan bahwa Max Weber tidak mendefinisikan birokrasi tetapi mengasumsikan bahwa definisi dari birokrasi adalah suatu kegiatan yang gagal dalam membuat pertentangan terhadap usaha agar dapat mendefinisikan konsep analisis organisasi yang lain. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Weber tidak menganggap bahwa "birokrasi" sebagai suatu bidang ilmu sosial. Sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan dengan hati-hati merupakan rincian dari pada segi-segi yang dipandang sebagai bentuk dari birokrasi yang rasional. Salah satu bentuk umum konsep Weber terlihat pada identifikasi jenis birokrasi lain yang terpisah dari tipe rasional.
2. Birokrasi dilihat sebagai organisasi yang sangat besar karena jumlah pegawainya semakin meningkat (Parkinson Law). Parkinson Law mengatakan:
 - a. Setiap Pegawai Negeri harus dengan sekuat tenaga berusaha untuk meningkatkan jumlah pegawai/bawahan
 - b. Setiap Pegawai Negeri harus dapat menciptakan tugas terbaru bagi diri sendiri yang sering dianggap atau diragukan manfaatnya dari hasil kerjanya.
 - c. Keberlanjutan birokrasi terus meningkat dengan jumlah pegawai yang naik secara otomatis yang tidak

tergantung pada beban tugas maupun pekerjaan yang ditangani.

3. Birokrasi dipandang sebagai perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan masyarakat (Orwelisasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Martini Rina. 2012. *Birokrasi dan Politik*. Semarang. UPT UNDIP Press Semarang.
- Muhammad. 2018. *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance)*. Lhokseumawe. UNIMAL PRESS
- Osborne David dan Plastrik Peter. 2001 *Memangkas Birokrasi*. Jakarta. PPM
- Permatasari Ane. 2020. *Birokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta. Buku Litera
- Thoah, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik Di Indonesia*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Yudi Rusfina dan Cahya Supriatna. 2021. *Memahami Birokrasi Pemerintah dan Perkembangannya*. Bandung. Alfabeta

BAB 2

PERSPEKTIF TENTANG BIROKRASI

Oleh Ahmad Rosandi Sakir

2.1 Pendahuluan

Birokrasi Indonesia, baik di pusat maupun di daerah pada masa Orde Baru, kerap mendapat perhatian dan kritik tajam atas perilaku pegawai negeri yang tidak konsisten. Jadi selalu ada efek negatif dalam birokrasi. Birokrasi dinilai lambat, rumit, menghambat kemajuan, cenderung lebih mementingkan prosedur daripada keadaan yang sesungguhnya terjadi, dan tidak efisien. Selama ini gambaran birokrasi kita belum baik. Citra dan efisiensi operasional aparatur administrasi masih perlu ditingkatkan. Masyarakat secara keseluruhan enggan berurusan dengan birokrasi. Birokrasi memiliki konsekuensi lebih dari citra negatif seperti buruknya kualitas pelayanan publik, KKN, cenderung memusatkan kekuasaan, kurangnya profesionalisme, kurangnya budaya dan etika yang baik. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa keadaan birokrasi pemerintah semakin mengkhawatirkan.

Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun. Krisis kepercayaan ini dibuktikan dengan banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat terhadap aparatur publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat birokrasi merupakan sarana efektif untuk mempertahankan kekuasaan para pemimpin Orde Baru, krisis kepercayaan terhadap birokrasi dapat dimaklumi. (Kurniasih, 2020) Baik birokrasi sipil maupun militer, melihat diri mereka sebagai alat bagi

penguasa daripada pejabat. Kepentingan pemimpin cenderung terfokus pada kehidupan dan tindakan pejabat publik.

Salah satu tugas utama negara adalah memberi pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun fasilitas. Bahkan untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah negara, pelayanan publik dapat digunakan sebagai salah satu indikator.(Dwiputrianti, 2009) Oleh karena itu, bila sebuah negara berada dalam posisi menuju pada kemajuan, hal utama yang perlu diperbaiki adalah pelayanan publik di negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang sedang bergerak menuju negara maju juga memprioritaskan pelayanan publik sebagai salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. Karena pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa jika masyarakat sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu pelayanan yang baik, maka masyarakat juga akan menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran.

Pelayanan publik dalam perkembangannya mengalami sebuah kajian yang sangat komprehensif. Kebutuhan penyediaan layanan juga semakin berkembang sehingga memerlukan telaah secara seksama dan berkesinambungan agar mudah dicapai apa yang kita sebut pemenuhan kebutuhan akan sebuah layanan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya public good atau public regulator. (Wahyu and Setio, 2017) Pelayanan publik pada hakikat nya adalah amanah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana definisi mengenai pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Suwarno, 2008)

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Di sisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Perspektif Terhadap Birokrasi
Kinerja birokrasi yang paling banyak mendapat sorotan dari masyarakat adalah rendahnya kualitas pelayanan umum yang merupakan kondisi sangat mengkhawatirkan yang dilakukan aparat pemerintah khususnya pegawai negeri sipil terhadap masyarakat.

Lembaga/Organisasi Pemerintah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan proses administrasi kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang berkualitas (Service quality) kepada masyarakat sebagai pelanggan. (Sakir and Mustari, 2022) Salah satu semangat reformasi adalah menghilangkan kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat, semangat untuk meningkatkan sektor pelayanan kepada publik. Jadi, kalau pada era reformasi sekarang ini ternyata pelayanan kepada publik masih juga belum tergarap dengan baik, itu berarti pengingkaran terhadap nilai-nilai reformasi. Itulah sebabnya, lembaga pelayanan publik yang terpilih memegang mandat untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan keberhasilan mereka adalah untuk mendekatkan harapan dan kenyataan tersebut.

Persoalannya adalah persepsi dan harapan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sering kali diasumsikan berdasarkan keyakinan konsumen tentang apa yang dirasakan. Kesenjangan pelayanan yang dilakukan para birokrat kepada masyarakat

sebagai pelanggan menyebabkan penilaian yang negatif terhadap aparaturnya pemerintah.

Menurut pendapat Fred Luthans (dalam Moenir 2000:221) terdapat jenis pelayanan, yang terdiri dari:

1. Layanan fisik dan sifatnya pribadi sebagai manusia.
2. Layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa dan organisasi negara).

Perbedaan, harapan dan persepsi masyarakat yang dilayani birokrasi pemerintah selaku pemberi layanan merupakan permasalahan krusial yang mengakibatkan terjadinya pelayanan tidak berkualitas, efektivitas dan inefisien.

2.2 Birokrasi Dari Perspektif Politik

Dari perspektif politik ini, birokrasi (Sanrego Nz and Muhammad, 2013) dipandang sebagai sarana kecil dari sebuah sistem negara melalui penyelenggaraan pemerintahan untuk mengerjakan urusan publik dalam rangka mewakili publik yang memberi perintah dan kewenangan. Pemerintahan hadir sebagai instrumentasi adanya negara. Negara terlahir karena adanya kesediaan publik untuk memberikan kepercayaannya kepada 'sedikit orang' untuk mengurus urusan publik melalui kontrak sosial. Kontrak sosial merupakan perjanjian sosial di antara anggota masyarakat untuk melakukan aktivitas pengaturan dan pengurusan atas urusan mereka sehingga lahirlah konsep 'negara'.

Karena itulah, birokrasi lahir sebagai instrumen negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menjawab dan mengurus urusan-urusan publik. (Suwarno, 2008) Dalam logika ini, pemerintahan beserta birokrasinya adalah himpunan bagian dari publik: anak kandung dari negara, cucu kandung

dari publik melalui perjanjian akad nikah dalam 'kontrak sosial'. Logika ini meniscayakan birokrasi adalah milik publik sehingga secara genesis melayani kepentingan publik. Karena inilah maka birokrasi pemerintahan dalam bahasan ini kerap disebut dengan 'birokrasi publik'. Konsekuensinya adalah birokrasi pemerintahan atau birokrasi publik secara genesis dan genuine hadir untuk melayani (urusan dan kepentingan) publik atau rakyat. Gagasan birokrasi publik mendekatkan dengan ide relasi birokrasi pemerintah dengan masyarakat dalam memproduksi pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Basis pemikiran birokrasi dan politik adalah prinsip-prinsip birokrasi publik, yakni birokrasi yang tunduk pada kepentingan 'pemberi kewenangan': rakyat (abdi rakyat). Bahwa kemudian dalam perkembangannya, birokrasi berevolusi menjadi mesin pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan penguasa, aparatnya lupa pada posisi pelayan rakyat dan sedang mengira dirinya adalah pelayan pemimpin hirarki birokrasi (abdi penguasa) karena di sanalah nasibnya digantungkan, dst, adalah suatu penyakit birokrasi (patologi birokrasi). Inilah penyakit degeneratif birokrasi, yang muncul dari proses-kehidupan birokrasi. Sebuah penyimpangan fungsi-fungsi sistemik dalam birokrasi.

Keberadaan birokrasi tak hanya dipahami secara organisasional, tetapi dalam kaitannya dengan masyarakat, publik, *civil society*. Perspektif politik akan menagih pemahaman akan birokrasi dan kinerja birokrasi dalam kaitannya dengan masyarakat, publik, *civil society*. Perspektif politik memandang birokrasi sebagai:

1. Produk sekunder dari proses politik melalui kontrak sosial yang melahirkan negara (produk primernya adalah 'negara').

2. Produk pemerintahan yang dibentuk oleh partai politik pemenang pemilu dan menguasai parlemen.
3. Elemen organisasi publik.
4. Alat teknikal untuk menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik
5. Instrumen Politik: instrumental teknikal negara melalui penyelenggaraan pemerintahan untuk melakukan tugas dan fungsi melayani tuannya yakni publik atau rakyat.
6. Instrumen Politik: instrumental politik praktis yang rawan dipolitisasi untuk kepentingan politik praktis dan politik elektoral.
7. Instrumen Politik: instrumental politik praktis dari kepentingan partai politik.
8. Instrumen Politik: penjemabatan kepentingan eksekutif dan legislatif.
9. Arena pendukung sumberdaya finansial partai politik.
10. Arena perebutan kepentingan politik dalam kartel partai politik.
11. Objek dan Subjek Politisasi Birokrasi
12. Objek dan Subjek dalam Pusaran Politik Gentong Babi
13. Objek dan Subjek dalam Diskursus Birokrasi Publik
14. Objek dan Subjek dalam Diskursus Politik

Ke-14 poin tersebut merupakan horison pemikiran tentang birokrasi dalam perspektif politik, yang meniscayakan adanya relasi birokrasi dengan politik.

Hakikat atau esensi dari politik adalah kekuasaan. Ada banyak penjelasan tentang kekuasaan. Salah satunya Weber, menjelaskan kekuasaan yang terlahir dalam hubungan sosial. Dalam hubungan social terdapat kekuasaan yang bekerja dalam hubungan itu. Yakni siapa yang lebih dominan terhadap siapa dalam suatu hubungan sosial. Dalam hubungan ini juga terdapat otoritas atau kewenangan. Weber menjelaskan 3

otoritas yang berkaitan dengan kekuasaan, yakni otoritas karismatik, tradisional dan legal-rasional. Hubungan sosial yang mengandung kekuasaan ini mengatur perilaku antar individu dalam komunitas atau dalam organisasi. Tentang siapa mengatur siapa menggunakan kekuasaan dan otoritas yang ada.

Otoritas legal-rasional diperoleh melalui prosedur formal berdasarkan aturan legal yang bersifat rasional. Organisasi modern bersesuaian dengan karakter ini. Birokrasi pada organisasi modern semisal organisasi pemerintahan memiliki kedekatan karakter dengan karakter legal-rasional hubungan social organisasional sebagaimana dikemukakan Weber.

2.3 Konsep, Pemikiran dan Praktik Birokrasi di Indonesia

Tipe ideal suatu birokrasi yang dicetuskan oleh Max Weber, dalam penerapan organisasi birokratik di Indonesia tidak berjalan seperti yang diuraikan dalam teori. (Suwarno, 2008) Birokrasi dalam pembangunan memegang peranan yang sangat penting, namun pada kenyataannya menimbulkan berbagai keprihatinan dan ketidakpuasan terhadap keberadaan dan kualitas yang diembannya sebagai aparatur publik yang dipercaya untuk melaksanakan visi, misi, tujuan serta sasaran yang dirumuskan untuk membangun bangsa ini. Dalam praktik birokrasi di Indonesia, terdapat beberapa aspek yang kontradiktif dengan teori birokrasi yang dicetuskan oleh Weber, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sistem Merit Aparatur

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, menurut Weber, dalam suatu birokrasi, perlu diterapkan merit system pada pegawai. (Sakir and Pattimura, 2022) Kenyataan di dalam praktiknya, mulai dari masalah

proses dan pola rekrutmen pegawai, jenjang karir sampai kepada pemilihan pejabat di lingkungan birokrat masih terkesan tertutup dan menerapkan senioritas atau masih belum sepenuhnya berdasarkan pada sistem merit (merit sistem). Hal ini mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja (*performance*) sektor publik. Di samping itu, karakter budaya kerja yang tidak profesional, lamban dan tidak transparan mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Padahal, di era globalisasi dan persaingan, tuntutan kinerja yang baik, sangat mutlak dibutuhkan.

Birokrasi di Indonesia umumnya masih belum memperlihatkan sikap yang belum profesional saat melaksanakan pelayanan dan mengemban tugas pemerintahan. Hal ini dapat disebabkan oleh belum

terbangunnya sistem kompensasi berdasarkan kinerja; serta kode etik (*code of ethics*) kepegawaian yang mengarah pada kesanggupan untuk terus meningkatkan prestasi, menjunjung integritas, mematuhi pada peraturan dan kejujuran, menjaga sikap sopan dan santun sebagai aparatur.

2. Citra Inefisiensi Praktik Birokrasi

Praktik birokrasi pemerintahan di Indonesia tidak simultan menampilkan citra efisiensi seperti yang disampaikan oleh Weber. (AR Sakir, 2021) Bahkan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan oleh oknum aparatur pemerintah telah sangat merugikan keuangan negara. Fakta-fakta yang terungkap dan temuan-temuan kecurangan dan penyelewengan keuangan negara telah dipublikasikan di berbagai surat kabar nasional maupun daerah pada Era Reformasi yang lebih transparan

ini. Termasuk didalamnya adalah berita hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh BPK, sampai kepada berita temuan korupsi oleh KPK. Berita dan diskusi tentang pemberantasan korupsi kolusi, korupsi, nepotismo serta pencegahan kebocoran serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara memberikan nuansa transparansi yang berbeda di era reformasi ini dengan era sebelumnya. Hasil temuan tersebut juga memberikan bukti nyata betapa 'semrawutnya' tata birokrasi pemerintahan dan keuangan di negara kita ini. Hal ini tidak saja menjadi pelanggaran secara hukum saja, lebih jauh lagi, hal ini dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Birokrasi yang profesional dan bersih sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Cooper, 2008). Pemerintahan yang kuat di Indonesia harus didukung oleh birokrasi yang profesional serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi terhadap masyarakat sebagai client utama pemerintah. Praktek-praktek kesewenangan atau otoriter, korupsi dan kolusi tidak bisa ditolerir lagi untuk mewujudkan strong government dan clean government. Sejak era reformasi, temuan-temuan yang berindikasi korupsi dan ketidakefisienan di sektor publik dilaporkan oleh satu lembaga pemeriksa keuangan negara (berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23E ayat 1), yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR/DPRD. Berdasarkan mandat dari Undang Undang Paket Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK ini juga harus dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga publik dapat dilibatkan untuk berperan sebagai control (pengendali dan pengawas) bagi sektor publik. Ini adalah suatu perubahan yang cukup signifikan untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik di negara kita. Sejak diberlakukannya perubahan ketiga UUD 1945 (2001) dan Undang-Undang Paket Keuangan Negara (2003-2004), temuan hasil pemeriksaan BPK sering terpampang sebagai berita utama (*head-line*) di berbagai surat kabar dan media lainnya.

Meskipun masalah birokrasi ini sudah lama dibicarakan oleh masyarakat luas, masih belum optimal dan efektifnya langkah-langkah yang dilakukan untuk menindaklanjuti malpraktik yang dilakukan oleh para pelaku korupsi di lingkungan administrasi pemerintahan dan pencucian uang (*money laundering*) uang negara. Pembinaan birokrasi terus dilakukan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum atau investigators, mulai dari kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu upaya yang sudah dilakukan, agar hasil temuan pemeriksaan keuangan negara yang berindikasi penyelewengan dan korupsi ditindaklanjuti secara serius oleh pihak-pihak yang berkaitan adalah penandatanganan kerjasama (Memorandum of Understanding atau MOU) antara BPK, Kantor Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK. Hal ini adalah langkah konkrit pembinaan dan reformasi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah praktik birokrasi di lingkup administrasi keuangan di Indonesia agar dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam perubahan UUD 1945, reformasi birokrasi didefinisikan sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan aparatur pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pendekatan yang digunakan pada konstitusi lebih merupakan pendekatan sistemik yang secara konseptual lebih mengutamakan komprehensi dibandingkan ekstensi. Guna menciptakan pembaruan, penyegaran sikap dan perilaku serta budaya kerja birokrasi yang lebih tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara RI telah merekomendasikan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan amandemen landasan konstitusional negara kita. Kebijakan ini dapat dikelompokkan menjadi empat dimensi yang perlu ditata ulang, yaitu: (1) masalah restrukturisasi atau pembenahan kelembagaan/organisasi, (2) masalah rasionalisasi dan relokasi sumber daya aparatur, (3) masalah ketatalaksanaan dan sistem prosedur yang dapat diupayakan lebih sederhana dan didukung oleh sarana prasarana teknologi yang memadai, (4) dekulturisasi budaya lama dengan menginkulturisasi budaya baru untuk mengatasi permasalahan budaya birokrasi.

Berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan merupakan upaya reformasi yang diarahkan cukup tepat untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Namun, pada kenyataannya, permasalahan birokrasi masih belum bisa diselesaikan secara tuntas di republik ini. Bila kita telaah dengan seksama, sejak diberlakukannya amandemen UUD 1945, pembentukan pemerintahan dilakukan melalui instrumen demokrasi yang bernuansa politis, seperti dilakukannya pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini juga mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya disamping aspek politis. Dimana, calon presiden terpilih akan menyediakan sejumlah kursi menteri bagi orang-orang yang dianggap olehnya berjasa atas kemenangannya. Bahkan pengusaha-pengusaha yang menjadi penyandang dana

(sponsorship) pada saat kompetisi mendapatkan kursi yang diduduki presiden terpilih juga akan mendapatkan kemudahan akses berbagai pelayanan dari pemerintah. Meskipun hal ini dianggap lumrah dalam kehidupan berpolitik, namun hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan birokrat terhadap kapasitas kepala pemerintahan terpilih.

Reformasi birokrasi dalam paradigma teoritikal kajian birokrasi lebih condong pada struktural efisiensi. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam hal ini adalah:

- a) Birokrasi sifatnya relatif permanen dan perlu dipahami sebagai kerangka berpikir kita dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Jadi, meskipun pemimpin dalam pemerintahan berganti menduduki kekuasaan, tetap dibutuhkan agenda reformasi birokrasi yang berkesinambungan.
- b) Perlu dilakukan strategi dan program untuk mewujudkan profesionalitas birokrasi. Hal ini sangat dibutuhkan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan tanpa dipengaruhi oleh siapa yang menjadi tampuk pemerintahan atau tanpa dipengaruhi oleh partai politik apa yang menjadi pemenangnya.

Fred W. Riggs menjelaskan perbandingan praktik birokrasi di berbagai negara berkembang dan negara maju dengan melalui model '*prismatic societies*' (kondisi masyarakat yang berbeda). Riggs dilahirkan di Cina dan anak seorang insinyur pertanian, yang bertugas mulai dari memberikan penyuluhan bagi para petani sampai kepada para akademisi dan praktisi di lingkungan departemen pertanian di Cina. Hasil pengamatannya yang pertama dalam pengembangan administrasi adalah metode yang dikembangkan oleh Amerika dalam teknik pertaniannya tidak dapat diterapkan di Cina. Menurut Riggs, produk

dasar dalam administrasi publik dapat dibedakan dalam 2 kurun waktu yang berbeda. Pertama, yang berkembang pada jaman kerajaan atau sebelum industrialisasi. Yang kedua, adalah produk pada jaman modern setelah adanya revolusi industrialisasi (Frederickson, 2008: 977-978). Banyak nilai dan norma budaya tradisional suatu negara yang perlu tetap dipertahankan walaupun secara berkesinambungan dapat meng-import berbagai pola dan metode yang berkembang. Jadi, dapat disimpulkan, bahwa meng-import suatu metode atau strategi yang dilakukan negara lain juga dapat mengakibatkan counter productive atau kepada hal yang tidak diharapkan terjadi, karena kultur dan perubahan dinamis masyarakat juga akan mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- AR Sakir, A.R. 2021. 'Budaya Birokrasi : Kinerja Pegawai Samsat Maros dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor', 7, pp. 25–35. Available at: <https://journal.ildikti9.id/sosiosains/article/view/573/402>.
- Dwiputrianti, S. 2009. 'Konsep Birokrasi Weber dan Praktik Birokrasi di Indonesia', pp. 1–6.
- Kurniasih. 2020. 'Problematika Birokrasi dalam Pemerintah', *Lingkar Widyaaiswara*, 07(Widyaaiswara Network Journal), pp. 17–22. Available at: www.juliwi.com.
- Sakir, A.R. and Mustari, S.H. 2022. 'Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros', 5(1), pp. 14–22.
- Sakir, A.R. and Pattimura, U. 2022. 'TENGAH EMPOWERMENT OF THE POOR BY THE SOSIAL WELFARE OFFICE IN LETWARU VILLAGE , MASOHI DISTRICT , CENTRAL MALUKU Salah satu kewajiban Pemerintah yakni melakukakn penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan sebagai pemenuhan atau wujud dari amanat raky', 3(1), pp. 1–10.
- Sanrego Nz, Y.D. and Muhammad, R. 2013. 'Analisa Perbandingan Model Birokrasi Indonesia: Model Modern Comparative Analysis of Indonesia Bureaucratic Model: Modern Model of Osborne and Gaebler and Islamic Concept Approach of Chapra's Perspective', *Jurnal al-Muzara'ah*, I(1), p. 18. Available at: www.TI.org.com.
- Suwarno, S. 2008. 'Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik', *Unisia*, 31(69), pp. 254–261. doi:10.20885/unisia.vol31.iss69.art5.
- Wahyu, D. and Setio, A. 2017. 'UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2017'.

BAB 3

BIROKRASI DAN POLITIK

Oleh Ahmad Mustanir

3.1 Pendahuluan

Birokrasi tak dapat terlepas dari mekanisme serta aktivitas politik. Politik sesuai yang diketahui bahwa terdiri dari individu-individu yang memiliki perilaku serta memiliki tindakan politik (*consist of people acting politically*) yang dikelompokkan secara politik oleh pihak-pihak berkepentingan serta berupaya untuk memberikan pengaruh terhadap pemerintahan agar bisa mengambil serta menjalankan sebuah kebijakan pemerintahan dan kebutuhan kelompok yang lain menjadi dikesampingkan. Kelompok rakyat tersebut memiliki kebutuhan yang diperjuangkan supaya pemerintahan menjadi dipengaruhi. Birokrasi pemerintahan langsung ataupun tak langsung akan selalu berkaitan dengan pihak yang berkepentingan pada lingkungan rakyat.

Signifikansi birokrasi pada politik bisa ditemui pada pertanyaan-pertanyaan politik yang dipaparkan oleh John Stuart Mill dalam *Consideration On Representative Government (Considerations on Representative Government, Chapters 1-5, Notes for Philosophy 166 Spring, 2006)*. Mill menuliskan jika birokrasi adalah badan yang mempunyai keahlian politik yang cukup tinggi walaupun dilaksanakan dengan nama aristokrasi ataupun monarki. Sebab tugas untuk melaksanakan pemerintahan oleh pihak-pihak yang memegang kedudukan pada pemerintahan dengan profesional tersebutlah yang jadi makna serta esensi dari birokrasi (Rusfiana and Supriatna, 2021).

Ledivina Carino (1997) menuliskan bahwa jenis birokrasi pada dunia dikelompokkan jadi tiga jenis yaitu jenis pluralis, marxis, serta otonom (Rusfiana and Supriatna, 2021).

- 1) Model Pluralis menyatakan jika cara kerja birokrasi merupakan output dari saling tarik menarik antara beragam kalangan yang tak satu pun dominan. Birokrasi didirikan karena terdapatnya hal yang disepakati dari beragam kalangan yang menentukan lembaga negara. Negara macam ini mempunyai keahlian untuk memperoleh suatu kebijaksanaan publik yang relatif bisa disetujui oleh seluruh kalangan.
- 2) Model Marxis merupakan birokrasi yang dengan penuh pemberi layanan kepada pihak yang memiliki kekuasaan. Pada jenis ini, birokrasi diberikan pengaruh dari kalangan pihak-pihak yang mempunyai modal. Kalangan yang kuat pada lingkup rakyat tersebut bisa memberikan pengaruh kepada birokrasi secara efisien. Walaupun rakyat diberikan keuntungan sebab kalangan itu mempunyai kebajikan.
- 3) Model otonom merupakan model yang sadar jika birokrasi memiliki sifat yang relatif berotonomi pada beragam unsur dalam sebuah lingkup rakyat. Pada paradigma tersebut, birokrasi berkepentingan sendiri untuk menghadapi beragam unsur negara. Elite birokrasilah yang menentukan pada situasi tersebut. Walaupun birokrasi mempunyai cabang yang begitu luas, pada jenis ini logika yang berjalan adalah birokrasi yang rasionalismelah yang jadi unsur pokok yang menyatukan kekuatan mereka pada suatu bangsa dan negara.

Berdasarkan pada konsep liberal, birokrasi pemerintahan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan yang memiliki akses secara langsung bersama masyarakat lewat mandat pemilu. Maka dari itu, birokrasi

pemerintahan tersebut bukanlah cuma diisikan oleh pihak-pihak birokratik, tapi terdapat suatu elemen-elemen yang ditempati oleh para pemegang jabatan politik. Begitu juga hal sebaliknya bahwa pemerintahan tersebut bukanlah cuma dipunyai oleh pimpinan politik dari para partai politik semata, tapi pimpinan birokrasi karir profesional pula.

Pada saat kehendak untuk menggabungkan para pemegang jabatan politik pada birokrasi pemerintahan tersebut muncul, maka muncul juga sebuah soal mengenai kaitan dari kedua pihak tersebut. Pertanyaan tersebut perlu dijawab menggunakan jawaban yang benar. Kaitan dari pemegang jabatan politik (*political leadership*) serta birokrasi adalah sebuah kaitan yang tetap atau konstan pada peran dominasi serta pengontrolan. Pada kaitan tersebut maka akan selalu timbul pertanyaan tentang siapa yang melakukan pengontrolan siapa serta siapa juga yang menjadi penguasa, menduduki posisi pemimpin, serta didominasi siapa. Pertanyaan tersebut sebetulnya adalah pertanyaan biasa yang mewujudkan dikotomi administrasi serta politik. Hingga karena hal tersebut, lalu muncullah 2 jenis cara penyelesaian yang pokok, yaitu apakah birokrasi menjadi subordinasi pada politik (*bureaucratic ascendancy*) ataukah sama dengan politik (*bureaucratic sublation atau attempt at co-equality with the executive*) (Ramadhanti, 2018).

Jenis solusi *executive ascendancy* diambil dari sebuah pendapat yaitu kepemimpinan pemegang jabatan politik tersebut berdasarkan kepada keyakinannya bahwa supremasi mandat yang didapatkan lewat kepemimpinan politik tersebut asalnya dari Tuhan ataupun asalnya dari masyarakat ataupun asalnya dari kepentingan publik (*public interest*). Supremasi mandat tersebut dilakukan legitimasi lewat pemilahan ataupun kekerasan ataupun penerimaan dengan *de facto* oleh masyarakat. Pada jenis liberal, pengontrolan bergerak dari

keotoritasan yang paling tinggi masyarakat lewat pihak yang mewakilinya (*political leadership*) terhadap birokrasi. Kekuatan dalam melaksanakan pengontrolan macam itu yang didapatkan oleh masyarakat sering dikatakan dengan *overhead democracy* (Martini, 2012).

Dominasi pimpinan pemegang jabatan politik pada birokrasi tersebut sebetulnya berpatokan pada dikotomi antara politik serta administrasi yang adalah sebuah doktrin yang memiliki pengaruh semenjak ditemukannya administrasi publik menjadi sebuah studi. Pemahaman mengenai supremasi pimpinan pemegang jabatan politik mengenai birokrasi tersebut muncul dari hal yang membedakan peranan antara administrasi dengan politik serta terdapatnya anggapan mengenai superioritas peran-peran politik pada administrasi. Dikotomi pada politik dengan administrasi dikarenakan terdapatnya hal yang salah pada berubahnya referensi dari fungsi menjadi struktur, pada perbedaan diantara perumusan kebijaksanaan serta penerapan, antara pemegang jabatan politik serta pemegang jabatan karier birokrasi.

Sementara birokrasi yang sama dengan politik (*bureaucratic sublation*) berdasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa birokrasi pemerintahan bukan cuma berperan menjadi mesin yang melaksanakan. Sementara Weber mempopulerkan jika birokrasi yang riil itu memiliki kekuasaan yang dipisah dengan kekuasaan yang diserahkan oleh para pemegang jabatan politik.

Politik dengan birokrasi merupakan 2 institusi yang tidak sama, tapi tak bisa terpisahkan. Kedua institusi tersebut melakukan kontribusi terhadap susunan pemerintahan daerah yang tepat. Siklus *check and balances* yang dilaksanakan oleh politik serta birokrasi tetaplah terdapat di koridor esensi daerah otonom.

Wilson (1887-1941) dan Goodnow (1990) sudah mendefinisikan hal yang membedakan pada Birokrasi dengan Politik, pada konteks ini politik masuk pada lingkup kebijaksanaan serta birokrasi ada di lingkup administrasi. Hal yang membedakan pada dua institusi itu mau tak mau harus beracu kepada jenis hubungan yang dinamis. Dinamika timbul pada saat siklus politik berjalan, baik birokrasi ataupun politik lewat siklus perancangan perundang-undangan, aturan daerah, serta lainnya. Kokohnya kaitan dinamis itu lalu terdapat juga pada saat birokrasi melaksanakan peranan untuk menegakkan kebijaksanaan dari badan politik yang memberikannya pengawalan (Muhammad, 2018).

Pada saat dua hubungan itu sejajar, muncullah bentuk dinamis hubungan politik dengan birokrasi. Jenis hubungan yang sejajar bukan merupakan bentuk yang melakukan penyeleksian ataupun melakukan birokrasi kepentingan antara satu dengan yang lainnya dan tak menghiraukan kepentingan rakyat. Pada hakikatnya institusi politik yang menggunakan prinsip demokrasi serta birokrasi sebetulnya begitu dibutuhkan pada siklus dibangunnya sebuah wilayah, namun makin kokoh birokrasi pada suatu wilayah maka akan makin rendah juga demokrasi lokal begitu juga sebaliknya makin rendah birokrasi maka akan makin kuat juga demokrasi.

Kenyataannya kini pada negara Indonesia melakukan refleksi pada kesamaan dari substansi pola bidang politik-birokrasi pada sebagian besar negara bertumbuh yang tengah ada pada tahap perubahan demokrasi. Hal itu bisa ditemukan pada karakteristik dari relasi politik-birokrasi misalnya tindakan pada lobi-lobi untuk melakukan pencarian kedudukan, mengintervensi politik pada penetapan kedudukan, serta rasa tidak nyaman dari pemegang jabatan birokrasi daerah yang ada pada ranah pelaksanaan politik daerah. Euforia demokrasi menjadikan pihak-pihak politisi

malah tak masuk pada lingkup demokrasi dengan menggunakan moment itu bagi kebutuhannya sendiri dan kelompoknya. Birokrasi pada akhirnya memberikan sambutan terhadap tindakan politik itu, hingga akhirnya berkhianat kepada masyarakat.

Situasi pemerintah daerah pada negara-negara yang sedang melakukan transisi dari keotoriteran menjadi demokrasi dicirikan dengan peristiwa-peristiwa yaitu meningkatnya dominasi badan politik pada birokrasi. Badan-badan politik, misalnya parlemen, kepartaian, serta pihak-pihak berkepentingan meningkat kekuatannya serta bisa melaksanakan pengontrolan kepada birokrasi. Dari segi lainnya, era diluar birokrasi dengan ekonomis pasif serta politis, hingga menjadikan peranannya melemah dalam mengawasi tindakan yang melanggar institusi birokrasi serta politik.

Pada saat relasi politik serta birokrasi tak mengalami perkembangan pada sinergi agar berhasil untuk membangun daerah, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa keduanya lebih dipertanyakan keahliannya dalam menjalankan pembangunan, utamanya pembangunan yang bisa melakukan antisipasi serta melakukan penahanan terhadap gejolak luar hingga dapat tercapainya level perkembangan yang mendukung, yang bisa melakukan distribusi dengan menyeluruh terhadap output dari perjuangan rakyat.

Relasi politik-birokrasi, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Toha, memanglah tidak mudah untuk dihindari dan justru bisa disebut mustahil. Termasuk juga melenyapkan pola politik pada esensi birokrasi. Birokrasi juga sudah jadi sebuah kekuatan politik dengan kedudukannya selaku pihak yang memiliki jaringan susunan sehingga sampai di lingkup rakyat, dikuasainya info-info yang mendukung, serta wewenang untuk mengeksekusi kegiatan serta penganggaran. Keberadaan

birokrasi jadi sebuah peralatan ataupun siklus agar dapat tercapainya target yang baik serta efektif bisa digunakan bagi kebutuhan publik ataupun suatu model politik.

Pada studi Administrasi Publik, birokrasi mempunyai beberapa arti, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh sebuah biro yang dinamakan official, lembaga eksekutif pemerintahan (*the executive organs of government*) serta seluruh pemegang jabatan publik (*public officials*), baik itu pemegang jabatan yang tinggi maupun rendah (Albrow, 2005). Antara 3 arti itu, ciri umum yang lekat di birokrasi merupakan eksistensinya yang dianggap menjadi sebuah badan pemerintahan (Malawat, 2022).

Sebagian besar pihak menilai jika teori birokrasi dirubah ke administrasi yang tidak efektif dan rasionalisme, meliputi perangkat lunak kriteria evaluasi serta pengspesifikasian sifat dari prinsip-prinsip tersebut (Martin Albrow, 1989). Konteks birokrasi lebih dinilai menjadi sebuah nilai yang bisa mengancam demokrasi, apalagi teori birokrasi jadi kekuatan yang dilaksanakan oleh para pemegang jabatan, konsep tersebut dengan fokus dianalisis karena membahas ihwal para pemegang jabatan negara yang melaksanakan target-target demokrasi. Harus diberikan pertanyaan yaitu apakah perilaku bergantung kepada bagaimana konsep-konsep demokrasi tersebut diartikan serta tafsiran manakah yang dinilai galat. Friedrich dan Finer merasa kasihan kepada permasalahan keselarasan praktek-praktek administrasi publik modern yang menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, sebab mereka meyakini jika bukanlah kekuasaan yang dilaksanakan oleh pejabat yang memunculkan permasalahan permanen, metode dalam memanfaatkan kekuasaan tersebutlah yang dianggap sebagai permasalahannya, maka dari itu harus diamati bagaimana tiap-tiap karakter dari birokrasi dan demokrasi dimanfaatkan pada upaya untuk melakukan

diagnosis serta memberikan kesembuhan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi (Djumadin, 2018).

Politik dan birokrasi yang ada pada administrasi negara merupakan dasar pemahaman birokrasi dan politik menggunakan nilai-nilai birokrasi publik, yaitu birokrasi yang ikut terhadap kebutuhan pihak yang memberikan wewenang yaitu masyarakat ataupun abdi rakyat. Lalu pada pertumbuhannya, birokrasi mengalami evolusi jadi mesin pemerintah yang melakukan pengabdian terhadap kebutuhan para pejabat, aparatnya tidak ingat terhadap kedudukan pemberi layanan masyarakat serta tengah merasa bahwa dirinya merupakan pemberi layanan terhadap pejabat atau abdi penguasa sebab disitulah nasibnya bergantung, yang merupakan sebuah penyakit dari birokrasi. Hal tersebutlah yang jadi penyakit degeneratif terhadap birokrasi, yang timbul dari siklus pelaksanaan kehidupan birokrasi. Suatu pelanggaran peran-peran sistematis pada birokrasi (Daniarsyah, 2015).

3.2 Birokrasi dan Politik

Pada negara-negara barat, seringkali birokrasi dianggap menjadi instrumen yang menjalankan kebijakan-kebijakan lewat badan-badan politik non birokrasi. Hal tersebut bermakna bahwa keikutsertaan birokrasi pada politik lebih dipusatkan terhadap level yang paling tinggi yaitu di level pihak yang membuat keputusan. Sementara pada negara-negara berkembang keikutsertaan birokrasi pada politik begitu tinggi, hingga birokrasi senantiasa berpengaruh pada pertumbuhan politik. Sebab tingginya keikutsertaan para birokrat di negara-negara yang tengah berkembang, tokoh-tokoh penulis barat juga menganggap jika terdapat kaitan yang khusus antara birokrasi dan sistematis politik yang diberlakukan, tentunya dengan argumen yang khusus juga.

Tiap-tiap sistem politik tersebut seharusnya memiliki karakter-karakter yang memiliki sifat universal, yakni pada bentuk peranan politik. Gabriel Almond mengemukakan pendapatnya bahwa peranan-peranan politik yang terdapat pada sistem politik bisa dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu yang pertama peranan input, yaitu pengertian kepentingan, pengagregasian kepentingan, sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik serta peranan output yakni perancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta menghakim kebijakan. Susunan politik diartikan menjadi sebuah bentuk interaksi yang dinilai resmi, di mana cara rakyat dilestarikan serta dipelihara. Pada rakyat politik modern ada susunan-susunan politik yaitu: kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga legislatif I, lembaga eksekutif, serta lembaga pengadilan.

Siklus politik tersebut dimulai dengan munculnya input yang berbentuk kebutuhan dan dimaknai ataupun dikemukakan oleh pihak berkepentingan serta diagregasikan ataupun digabungkan oleh kepartaian politik hingga kebutuhan-kebutuhan spesifik tersebut jadi sebuah pengusulan kebijakan yang semakin umum, kemudian dimasukkan pada siklus perancangan kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga legislatif serta eksekutif. Pada konteks ini, input tersebut diubah jadi output dalam bentuk kebijakan, sebab tahapan tersebut dikatakan pula dengan konversi. Serta tahap perancangan kebijakan tersebut juga adalah pusat dari seluruh siklus politik. Kebijakan tersebut lalu dibuat oleh birokrasi.

Selain itu pada tiap-tiap siklus politik juga dilaksanakan peranan-peranan sosial politik, komunikasi politik serta perekrutan politik. Begitulah siklus tersebut dijalankan, dari input berbentuk penuntutan kepentingan dirubah jadi output yang berbentuk kebijakan pada sistem politik dengan wujud penuntutan kepentingan yang baru. Begitu juga seterusnya.

Kemudian jika dilihat dengan baik, terlihat jika peranan input tak cuma dilaksanakan oleh susunan-susunan yang hanya memiliki sifat politis, namun dapat juga dilaksanakan oleh struktur-struktur pada sistem sosial yang lebih meluas yang pada konteks ini memiliki fungsi politik, Sama halnya dengan kelompok yang memiliki kepentingan pada agama, budaya, serta lainnya. Namun peranan output adalah memonopolian dari struktur-struktur politik yang legal formil. Misalnya birokrasi, parlementer, lembaga peradilan, serta lembaga eksekutif, hingga peranan tersebut dikatakan menjadi "fungsi pemerintahan".

Baiknya, tiap-tiap susunan politik mempunyai peranan politik yang memiliki ciri khas, misalnya pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan artikulasi kepentingan, kepartaian politik yang melakukan agregasi terhadap kepentingan, lembaga legislatif yang melakukan perumusan terhadap kebijakan, serta birokrasi yang menjalankannya dan lainnya. Namun hal tersebut tidak menjadi kenyataan: biasanya pada tiap-tiap sistem politik ada semua susunan yang melaksanakan lebih dari satu peranan ataupun satu peranan dilaksanakan oleh lebih dari satu struktur.

Sebuah peristiwa penting yang bertumbuh pada lingkup rakyat transisi yaitu kurang seimbangnya antara badan-badan yang mengambil kebijakan politik dengan struktur-struktur pelaksana kebijakan birokrasi kekurangan relatif pada bagian-bagian politik terdapat makna yang menyatakan bahwa peranan politik lebih ditetapkan, pada jumlah yang besar, oleh para birokratik. Persaingan persaingan antar birokrasi muncul menjadi jenis utama pada politik. Namun jika area politik tersebut berubah menjadi birokrasi sebuah perubahan yang dicirikan dengan makin kokohnya kekuatan para pejabat militer untuk berhadapan dengan para pemegang jabatan negeri yang bisa berdampak kepada kestabilan politik,

perkembangan perekonomian, keefektifan pemerintahan, serta prinsip-prinsip demokrasi yang begitu riskan.

Dalam menganalisis jenis hubungan birokrasi dengan sistem politik tersebut, Fred W. Riggs mengemukakan sejumlah aspek yang dinilai berpengaruh besar pada pertumbuhan sistem politik pada negara-negara yang tengah berkembang, yaitu pada kaitan birokrasi dan sistem partai, calon, undang-undang, peradilan serta pimpinan eksekutif.

Untuk membicarakan mengenai kaitan antara birokrasi dan sistem partai, Riggs memberikan penekanan bahwa pengangkatan birokratik perlu berdasarkan standar prestasi, yang ditunjukkan secara baik dengan melakukan metode pengujian. Begitu juga dengan proses personalia yang berdasarkan kepada konsep karir serta prestasi.

Kondisi birokrasi karir jika tak Ada kekuatan politik pada badan-badan politik, tak senantiasa memunculkan manfaat yang administratif. Jika tak diberikan arahan dengan kuat, bisa membuat para birokratik memiliki rangsangan yang tidak kuat dalam menyerahkan layanan dengan baik, apapun yang melatarbelakangi mereka sewaktu belum bekerja terhadap negara. Mereka lebih memanfaatkan pengendalian efisiensi untuk memberikan keamanan terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan birokrasi.

Pada sebuah pemerintahan yang didirikan dengan pendorongan birokrasi, pihak yang oposisi lebih diberikan toleransi, serta kepartaian yang bisa memenangkan pengambilan bentuk menjadi sebuah koalisi dengan sejumlah komponen yang tidak sama. Koalisi yang memiliki kekuasaan tak terlalu mempunyai kesatuan ataupun koherensi, walau dia bisa jadi pihak yang mewarisi sebuah tradisi revolusi dari zaman persaingan umum menghadapi kekuasaan kekuasaan asing. Pada kondisi di mana demokrasi terlaksana secara optimal, partai oposisi senantiasa memberikan bantuan untuk

menjadikan partai yang memiliki kekuasaan lebih cepat untuk menanggapi serta ikut memberikan pertanggungjawaban pada beragam kepentingan rakyat. Pada sisi lain, fraksi-fraksi yang melakukan penentangan terhadap kebijakan birokrasi, ternyata tak bisa memberikan perkembangan terhadap dampak-dampak macam ini. Justru sebaliknya, mereka seringkali meremehkan sistem serta melihat koherensi partai yang memiliki kekuasaan sebagai hal yang lemah.

Bagi negara yang tengah berkembang, spesifiknya pada permasalahan di mana kepartaian yang lebih menonjol yaitu partai pemerintahan, banyaknya penentangan dari fraksi-fraksi dengan birokrasi tentunya tak memberikan keuntungan. Karena hal yang disepakati oleh para pihak yang membuat kebijaksanaan serta melakukan penerimaan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, begitu bergantung terhadap integrasi dari para tokoh-tokoh politik yang ikut serta pada pembuatan kebijakan tersebut. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Raymond Aron yang diambil oleh Lester G. Seligman (dalam Affan Gaffar, 1983:115) yang menyatakan jika komposisi pemerintah bisa dibuat oleh transisi-transisi dengan berprogres, dan mengganti sejumlah tokoh pokok pada birokrasi. Namun kesejahteraan, sama halnya yang telah direncanakan oleh pihak yang merencanakan pembangunan, cuma bisa dicapai jika kerjasama politik bisa dipertahankan. Maknanya, di antara para pemegang jabatan pemerintahan dengan tokoh-tokoh politik, perlu adanya persatuan dan kesatuan, baik pada gagasan ataupun perilaku (Djumadin, 2018).

Hal lainnya yang ditonjolkan oleh Riggs pada pembicaraannya tentang hubungan birokrasi dengan sistem politik yaitu yang berhubungan dengan pencalonan. Dinyatakan jika supaya pemerintahan lokal bisa memberikan makna menjadi sebuah dasar untuk melakukan pembinaan

terhadap politik nasional, hingga perlu mengikutsertakan opsi-opsi pencalonan pada beragam kegiatan, Di mana para pemberi suaralah yang perlu memberikan bayaran, walaupun hanya sebagian. Apabila suatu partai memberikan penawaran janji untuk melakukan perluasan jalanan serta kegiatan sekolah dengan pembiayaan pajak dengan cenderung tinggi, jadi partai saingannya kemungkinan bisa memberikan penawaran dengan beragam keuntungan-keuntungan umum, contohnya memberikan janji untuk mengumpulkan pembiayaan dengan membedakan jumlah pajak, di mana beban-beban nantinya jatuh dengan berat pada sebuah pihak ataupun pihak lainnya yang berasal dari organisasi itu. Namun dengan cara inilah, politik ataupun yang memberikan suara bisa memahami arti dari pilihan politik daripada agitasi serta penghasutan (Riggs, Loc. Cit., :115) (Surbakti, 2010).

Membahas tentang birokrasi serta kelompok kepentingan, Riggs (Ibid :188-122) menyatakan jika pengembangan politik memiliki 2 definisi, yakni menjadi siklus demokrasi serta siklus politisasi. Demokrasi dimaknai menjadi mekanisme perkembangan pada pengendalian masyarakat kepada pemerintahan, sementara politisasi maknanya memberikan peningkatan peranan dan masyarakat pada program negara.

Pada negara-negara yang tengah membangun, lembaga-lembaga birokrasi didirikan agar bisa menjalankan kegiatan-kegiatan baru, yang diberikan arahan terhadap konsep negara kemakmuran. Konsep tersebut ternyata memberikan pengaruh yang cukup terlihat pada lingkungan masyarakat. Dimulai dari pemberian layanan kesehatan secara umum, pertanian serta pendidikan hingga pada pembangunan organisasi, kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan sebuah keadaan yang massif. Dalam menjalankannya, para pemegang jabatan perlu melakukan mobilisasi terhadap beragam pihak berkepentingan

agar bisa memberikan peranan aktif yang menjadi pendorong kegiatan. Lewat pihak-pihak berkepentingan tersebut, birokrasi bersama sabuk transmisinya bisa memberikan perluasan terhadap jangkauannya dalam melaksanakan mobilisasi dengan menyeluruh. Sehingga berkembangnya pihak-pihak berkepentingan bisa memberikan peningkatan terhadap pengendalian birokrasi, tanpa perlu memperkokoh inti-inti kekuasaan politik otonomi yang bisa melaksanakan roda birokrasi di bawah pengawasan masyarakat (Ramadhani *et al.*, 2022).

Terdapat sejumlah penyebab mengapa dibentuknya pihak-pihak berkepentingan yang memiliki sifat otonom kebanyakan lemah pada negara-negara yang tengah berkembang:

- 1) Pertama yaitu terdapatnya hal yang cenderung berada pada pihak birokratik agar memiliki rasa kecurigaan kepada pihak-pihak otonomi yang berada pada luar pengawasan mereka. Selain itu, memanglah cenderung lebih mudah untuk melakukan penanganan terhadap sebuah sistem yang diatur dengan menyatu, spesifiknya apabila sistem tersebut sudah dilakukan perumusan dalam pemenuhan poin-poin spesifikasinya.
- 2) Yang kedua yaitu finansial. Pada negara-negara yang kurang mampu, pembiayaan lembaga dengan sukarela sulit didapatkan dari anggotanya dalam pemenuhan kepentingan kehidupan minimum mereka pribadi. Mereka perlu tunduk terhadap hal-hal yang mengharuskan ataupun meminta bantuan-bantuan finansial dari aparat pemerintahan. Maka dari itu tak bisa dihindari apabila pemerintahannya melakukan pengendalian menjadi sebuah persyaratan dalam memberi bantuan. Maka dari itu, pihak-pihak swasta tersebut bisa jadi sabuk transmisi untuk birokrasi.

3) Yang ketiga, pimpinan modern di masa sekarang ini biasanya pasalnya dari serta adalah pihak-pihak cendekiawan, dengan alasan pendidikan sesuai yang terdapat pada konteks serta aspirasi dunia modern. Pimpinan-pimpinan tersebut lebih dimasukkan pada komunitas-komunitas di tingkatan pusat, hingga wilayah-wilayah kurang mempunyai pemimpin yang modern. Sebab terdapatnya posisi yang kosong pada partikel tersebut, birokrasi menaruh perwakilan-perwakilan lokal dari pemerintahan pusat yang lebih memiliki pengalaman serta lebih memiliki pendidikan. Sehingga pada wilayah pedesaan, pimpinan-pimpinan yang berasal dari pihak berkepentingan tentunya akan senantiasa muncul menjadi pihak yang melakukan kendali pada siklus modernisasi. Kedudukan superioritas tersebut, menjadikan agar dilakukannya pembinaan terhadap masyarakat-masyarakat swasta dengan siapa saja mereka melakukan hubungan.

Pada uraian tersebut dilihat jika birokrasi begitu memiliki pengaruh pada sebuah sistem politik. Pengaruh tersebut bisa ditanam lewat siklus pencalonan atau lewat pihak-pihak berkepentingan, dengan semakin spesifik, birokrasi memiliki peran yang begitu menonjol juga pada mekanisme pengembangan politik, yang adalah bagian dari pengintegrasian daripada pengembangan negara. Pada konsep tersebut, birokrasi sering juga melakukan peranan menjadi pihak yang menggerakkan (Satispi and Kurniasih, 2019).

Birokrasi pemerintahan tak bisa dihindari dari mekanisme serta program politik. Pada tiap-tiap kelompok rakyat yang melakukan pembentukan pada sebuah susunan pemerintah tak bisa lepas dari nilai politik tersebut. Politik sesuai dengan yang kita tahu bersama-sama bahwa didalamnya

terdapat orang-orang yang memiliki perilaku serta memiliki tindakan politik. (*consist of people acting politically*) yang dikelompokkan dengan politik oleh pihak-pihak berkepentingan serta berupaya untuk memberikan pengaruh pemerintahan untuk mengambil serta menjalankan sebuah kebijaksanaan serta perilaku yang dapat menonjolkan kepentingan mereka. Pihak warga tersebut memiliki kepentingan yang mereka perjuangkan supaya aparat pemerintahan bisa dipengaruhi. Birokrasi pemerintahan secara langsung atau tak langsung bisa senantiasa memiliki hubungan bersama pihak-pihak berkepentingan pada lingkup rakyat (Agustino, 2020).

Tak akan bisa membuat birokrasi terpisah dari pengaruh politik ataupun sistem politik pada sebuah negara. Tingkat kenetralan bisa diuji jika diberikan penopang oleh transisi kebudayaan lembaga serta kinerja yang mempunyai ideologi pada perspektif nasionalisme, Justice, Sosialisme, serta Humanisme. Gagasan lainnya yang dipaparkan oleh Miftah Toha menyatakan bahwa kenetralan birokrasi pada dasarnya merupakan sebuah sistem dimana birokrasi tak bisa diubah dengan hanya memberi layanan terhadap masternya (berasal dari parpol yang menjalankan pemerintahan), walaupun masternya diganti oleh master lainnya. Pada saat tergantinya master pada pemerintahan, hal tersebut tak bisa memberikan gangguan terhadap kinerja birokrasi yang menyerahkan layanan terhadap publik. Birokrasi bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan otoritas serta kapasitasnya.

Faktanya sebab manusia merupakan makhluk sosial politik pada keadaan serta kondisi apapun tak bisa dipisahkan dari hasrat untuk memiliki kekuasaan ataupun ikut serta pada suatu pemerintahan. Pentingnya dikendalikan pada saat tersebut pada birokrasi yakni di tatanan partisipasi birokrasi pada kesepakatan politik di permasalahan-permasalahan

kenegaraan kesejahteraan serta keadilan. Tak terperangkap pada politik praktis yang nantinya mendorong serta menang pada sebuah partai politik (Mustanir, 2022) .

Birokrasi tersebut sebetulnya pemegang serta memanfaatkan kekuasaan politik. Karena hal tersebut, mereka yang berusaha dalam memahami badan-badan publik tak dapat cuma mencatat administrasi dari politik lalu keluar dari kompleksitas pada teori politik. Apabila birokrasi memberikan bantuan dalam menetapkan keinginan negara, maka tak dapat dipungkiri jika mereka adalah badan politik pula (Saksono *et al.*, 2022).

Tiga poin yang rawan pada saat birokrasi berpartisipasi pada politik.

- 1) Timbulnya intervensi politik pada saat ditempatkannya jabatan-jabatan dalam birokrasi. Masuknya intervensi politik dapat mengganggu sistem karir serta perekrutan sebab berdasarkan kepada relasi politik. Sepatutnya berdasarkan dengan sistem impersonal serta merit.
- 2) Pada saat birokrasi politik, dicemaskan terdapatnya penyimpangan kewenangan dari asal-asal keuangan serta sarana publik yang dimanfaatkan oleh birokrat dalam mendorong afiliasi politik mereka.
- 3) Keikutsertaan birokrasi pada politik di zaman sekarang pula bisa menyebabkan timbulnya peminatan-pemihakan terhadap suatu kalangan, yakni kalangan-kalangan yang sama aliran politiknya bersama para birokrat tersebut. Hal tersebut tak bisa dilepaskan dari kenyataan jika birokrasi tersebut mempunyai otoritas dalam melakukan pengalokasian serta melakukan pendistribusian sumber-sumber yang mereka miliki. Jika hal tersebut terjadi dapat terjadinya reduksi posisi birokrasi menjadi badan publik ke badan yang cenderung memberikan keuntungan kepada sejumlah kalangan rakyat.

3.3 Birokrasi dan Politik di Indonesia

Sementara birokrasi pada negara kita saat ini tak dapat terlepas dari latar belakang sejarah perkembangannya. Birokrasi pemerintahan Indonesia saat ini merupakan lanjutan dari demokrasi di era terdahulu, utamanya yang paling memiliki pengaruh yaitu birokrasi di era kerajaan Jawa serta birokrasi di era kolonial Belanda.

Berdasarkan gagasan yang dikemukakan oleh Karl D. Jackson, kerajaan birokrasi pada negara kita di masa kini masih diwarnai oleh sejarah masa lalu yakni berbentuk teori politik suku Jawa tradisional yang aristokratis.

Kedudukan itu berjalan hingga masa-masa akhir dari kekuasaan Belanda. Hingga munculnya elit-elit nasionalisme. Jika peraturan pemerintah bekerja sama dengan sejumlah anggota Volksraad (parlementer), peranan PP menjadi peralatan politik menjadi lebih menurun. Dengan timbulnya sejumlah lembaga di era ini, sudah menggantikan tradisi penghambat PP pada kekuasaan kekuasaan kolonial. Pimpinan lembaga-lembaga itu, Budi Utomo, Sarekat Islam, kumpulan-kumpulan agama serta kalangan-kalangan pemuda, yang diketuai oleh sejumlah orang sarjana ataupun di drop out dari universitas. Walaupun mereka banyak yang pasalnya dari keluarga yang priyayi, aku kalangan intelektual mereka tak ingin jadi kaum birokrasi. Mereka lebih suka pekerjaan sebagai wartawan, ahli hukum serta lainnya. Namun sesudah kemerdekaan mereka banyak yang masuk lagi pada birokrasi (Djumadin, 2018).

Revolusi kemerdekaan merubah berbagai bidang kehidupan rakyat, coba merubah pada bidang birokrasi, tapi tak termasuk sikap serta pola tradisional berubah secara pesat. Pada wilayah-wilayah yang berlatar belakang sejarah agraris, pola tradisional yang lama lebih susah untuk dicairkan jika dibandingkan wilayah-wilayah pesisir. Sikap-sikap tradisional

lama Sama halnya sikap feodalistik, partikularistik, "diffus", begitu juga susunan serta sistemnya yang diubah, sikap-sikap tingkah laku masyarakat, terkhusus tingkah laku mereka yang digolongkan sebagai kalangan elite, masih berkelanjutan. Bentuk tradisionalisme yang lama terkadang dicerminkan pada bungkus lainnya tapi dasarnya tidak berbeda ataupun justru dengan timbulnya transisi pada rakyat timbul juga berperan sikap-sikap lama pada jenis yang baru yang lebih kompleks lalu orang mengatakannya menjadi gejala munculnya neo-tradisionalisme.

Kemudian kaitan antara birokrasi dengan politik pada negara kita bisa dilihat di zaman pemerintahan orde baru. Taktik politik pemerintahan orde baru untuk melestarikan kebutuhan-kebutuhan politik tidak pembangunan nasional serta keberlangsungan kekuasaan, menggunakan birokrasi menjadi partner ABRI.

Pemerintahan orde baru semenjak era 1996 berhadapan dengan tantangan yang berat pada saat penataan birokrasi dengan efisien agar dapat mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pengembangan. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan meliputi usaha peningkatan untuk mendayagunakan aparat negara pada pusat ataupun pada daerah, aparat ekonomi negara yang bersangkutan dengan aspek badan, pegawai dan tatalaksana. Di sini komponen-komponen yang memiliki peran di esensi birokrasi terdapat perubahan dari bangunan kalangan politisi serta sebagian kecil PP, lalu diisi serta diperluas menggunakan komponen teknokrat, kalangan ahli serta profesi, angkatan yang memiliki senjata eksponen organisasi pemuda serta lainnya. Karena hal tersebutlah aparat pemerintahan orde baru menilai jika birokrasi adalah fasilitas yang paling optimal dalam mewujudkan hal-hal di atas, karena dampak tradisional yang masih lekat di lingkup rakyat mungkin bisa membuat birokrasi dapat melakukan permainan peran yang aktif serta

efisien untuk berhadapan dengan masyarakat (Mustanir and Darmiah, 2016).

Semenjak dibentuknya pemerintahan orde baru, apalagi semenjak diberlakukannya kebijakan restrukturisasi politik, bangsa tersebut mengalami perubahan kekuasaan serta pengubahan aliansi kelompok, pergeseran dominasi kekuasaan negara terhadap kemiliteran. Perubahan tersebut membuat berkembangnya sebuah birokrasi pemerintah yang sangat kokoh serta stabil. Gejala tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan administrasi, tapi memiliki sifat kekuasaan serta politis.

Dua sifat paling akhir yang terkandung tersebut, melakukan penyaringan terhadap kekuasaan-kekuasaan agar memperbesar supaya senantiasa ada di dekatnya. Birokrasi tentunya bertransformasi jadi tempat kepuasan yang begitu penting serta memiliki fungsi ganda.

Pada sebuah kelompok yang memiliki fungsi sebagaimana mestinya, peralatan administratif pemerintah. Di sisi lain, ia adalah tempat kekuatan agar bisa memberikan ketahanan terhadap status quo ataupun menjalankan antara jaringan kekuasaan yang memberikan perlindungan kepadanya.

Supaya tetap bisa tahan pada kedua peran tersebut, sebuah usaha pengintegrasian komando antara birokrasi pada tingkatan pusat bersama birokrasi birokrasi yang disebar pada wilayah-wilayah yang menjadi wilayah yang penting juga. Integrasi komando serta pengontrolan tersebut membuat implikasi politik pada tingkatan lokal lahir.

Karena pada tiap-tiap daerah ada kekuatan yang dipusatkan serta kekuasaan yang berada pada tangan birokrasi. Pemusatan pemusatan kekuatan lokal tersebut pada koordinasi pusat, melakukan pembentukan jaringan kekuatan serta kekuasaan yang dikendalikan serta dikontrol.

Pengakumulasian kekuasaan antara pusat dengan daerah ditambah lagi dengan kekuasaan-kekuasaan yang memiliki kepentingan untuk memberikan perlindungan, membuat sebuah jaringan serta bagan kekuatan dan kekuasaan besar pada tingkatan nasional.

Sikap politik serta kekuatan birokrasi tersebut dan peranannya untuk menguatkan status quo serta suksesi, membuat ia perlu menciptakan sifat-sifat yang dikehendaki. Yakni upaya untuk melihat perbedaan antara diri dari sisi politis dengan kelompok lainnya.

Berbeda dengan penjelasan mengenai pertumbuhan peranan politik pada birokrasi di atas bisa dikatakan bahwa beberapa penyebab yang menjadi latar belakang pada keterlibatan pihak-pihak birokratik pada politik.

Pertama yaitu kebutuhan pihak-pihak pemegang kekuasaan dalam melakukan komunikasi bersama rakyat. Sebab para penguasa di Indonesia biasanya rakyat luas, jadi para pihak birokratik yang asalnya dari kalangan rakyat itu serta memegang kekuasaan pada jaringan komunikasi lewat wewenang administratif, dinilai kuat untuk menjalankan penugasan seperti itu. Pada beragam jenis argumen, tetaplah memiliki pendaftaran yang tidak berbeda, rezim kolonial hingga di penguasa sesudah merdeka memakai argumen yang pertama tersebut.

Kedua kebutuhan rezim terhadap dorongan rakyat, juga menjadi sebab keikutsertaan birokrasi pada area politik. Pada konteks tersebut tentu sangat berguna dalam memanfaatkan jaringan komunitas birokrasi pada sebuah pihak, serta masyarakat akan merasa segan dan hormat kepada birokrasi pada pihak lainnya.

Ketiga yaitu keperluan pihak-pihak yang memegang kekuasaan untuk pergerakan daerah pada beragam kegiatan pemerintahan, padahal tersebut penggabungan kemampuan

pihak-pihak birokratik pada penyebab pertama serta kedua di atas yang dipertimbangkan untuk mengikutsertakan birokratik pada mekanisme politik.

Keempat yaitu berbeda dari kemampuan teknis yang dimiliki oleh pihak-pihak birokratik pada perancangan, mengelola dan mengawasi sehingga para pemegang kekuasaan di era akhir tersebut menjadi teman kerja pada saat menjalankan pengembangan. Penghargaan elit pemegang kekuasaan kepada keahlian dalam membangun birokrasi itu, yaitu berkat sejarah masa lampau, yaitu output dari pelatihan yang ditumbuhkan semenjak zaman kolonial.

Sepertinya 4 penyebab tersebut sudah menunjukkan mengenai keikutsertaan demokrasi pada mekanisme politik yang asalnya dari kaum tersebut juga. Secara umum keikutsertaan tersebut merupakan dalam pemenuhan keperluan pemegang kekuasaan serta untuk perangsangannya juga. Walaupun begitu masih bisa ditemui penyebab yang asalnya dari dalam diri birokrasi itu sendiri. Pelaku pendorong serta pihak yang menggerakkan birokrasi pemerintahan, pihak-pihak birokratik tak bisa lepas dari sikap Oligarkhis yang umumnya menggunakan komunitas dalam melakukan pembelaan serta pemenuhan kebutuhannya sendiri. Beragam perilaku para pejabat misalnya korupsi ataupun penyalahgunaan kewenangannya bisa terlihat menjadi bagian dari sikap itu. Begitu juga dengan beragam fasilitas-fasilitas yang diutamakan yang didapatkan serta ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak birokratik (Nengsih *et al.*, 2023).

Sepertinya Robert Micheals betul mengenai konsep oligarkhinya yang digunakan dalam melakukan penalaran terhadap birokrasi yang ada di Indonesia, sehingga bisa disimpulkan jika dengan ataupun tak adanya politik, birokrasi bisa mendapatkan keuntungan dari wewenang yang dimilikinya. Walau dalam situasi tersebut, peran politik

birokrasi cuma untuk membesarkan peluang kaum tersebut dalam mendapatkan keuntungan pada kewenangan yang dimilikinya. Kemudian, pada saat melakukan penyaluran ataupun melakukan pendampingan terhadap birokrasi pada saat penyampaian kebutuhan politik tersebut. Birokrasi bisa memanfaatkan suatu partai politik (Almahdali *et al.*, 2023).

Peran birokrasi pada sebuah negara begitu bergantung kepada beragam faktor. Selain dari faktor politik, perekonomian, ideologi, sosial budaya, teknologi pada sebuah bangsa memiliki peran yang pokok untuk memberikan warna terhadap karakter ataupun peranan birokrasi, juga tokoh-tokoh ataupun pengusaha yang menempuh ke pemerintahan memiliki dampak yang jadi penentu, walaupun begitu, buat apa unsur-unsur itu bisa memberikan pengaruh terhadap corak birokrasi, namun misi yang ingin dicapai oleh tiap-tiap birokrasi yaitu bekerja agar bisa tercapainya kebutuhan masyarakat, terlepas dari apakah sebuah negara dalam bentuk monarki ataupun Republik, memiliki sistem demokrasi ataupun totaliter. Tak kadang ikut serta pada perjalanan sejarah terdapatnya birokrasi yang tidak diterima serta justru digilas oleh masyarakatnya sendiri, baik pada metode untuk mengambil kekuasaan dengan damai atau lewat peperangan sebab dilalaikannya kebutuhan masyarakat atas rezim yang memiliki kekuasaan.

Selain itu terdapat juga birokrasi yang bisa tahan lama walau di dalam birokrasi tersebut ada hal yang timpang atau pun keropos yang disebabkan oleh pihak-pihak yang ingin memperkaya dirinya sendiri.

Dari negara-negara yang tengah berkembang sama dengan Indonesia. Orientasi birokrasi yang mereka terapkan tak terdapat metode alternatif kecuali yang mengarah terhadap berhasilnya suatu pengembangan yang dilaksanakan.

Jika dipandang dari sisi teori, kestabilan politik banyak ditetapkan oleh tiga variabel yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu pertumbuhan perekonomian yang mendukung, pertumbuhan kelembagaan baik struktur ataupun mekanisme politik, serta partisipasi politik.

Pada bidang politik, maka birokrasi perlu bisa membuat sebuah situasi politik menjadi sehat, tak senantiasa di rongrong baik pada dalam ataupun pada luar. Birokrasi perlu melakukan kerjasama bersama semua kalangan-kalangan pada rakyat bagi kebutuhan bersama serta memberikan keuntungan pada berhasilnya pengembangan. Untuk berhadapan dengan perongrongan ataupun tiap-tiap kekuasaan bangsa, maka birokrasi perlu dapat saling bekerja sama bersama kekuasaan politik yang terdapat pada rakyat, hal tersebut merupakan pula pada rangka partisipasi rakyat dalam mekanisme politik. Birokrasi perlu juga bisa membuat kondisi korektif serta kreatif pada beragam kekuasaan partai politik untuk mencapai demokrasi yang baik serta optimal untuk kebutuhan dan melancarkan pelaksanaan roda pemerintahan negara, hingga semua kekuatan sosial politik yang terdapat bisa bertumpu terhadap usaha yang mendorong kebijakan serta upaya-upaya aparat pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan. Stabilitasnya politik dengan mantap bisa memberikan jaminan terhadap kelancaran pembangunan. Maka dari itu, badan-badan politik yang terdapat pada lingkup rakyat perlu diberikan peningkatan kesadaran tentang seberapa penting kestabilan politik untuk dapat berhasilnya tiap-tiap pembangunan (Ravyansah *et al.*, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing. Available at: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Almahdali, H. *et al.* 2023. *Sistem Politik Indonesia*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Daniarsyah, D. 2015. 'Bureaucratic Political and Neutrality of Bureaucracy in Indonesia', *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 5(2), pp. 85–94.
- Djumadin, Z. 2018. *Birokrasi dan Politik Pada Era Pemerintahan Orde Baru di Indonesia*. Jakarta: LPU-UNAS Jakarta.
- Malawat, S.H. 2022. *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Martini, R. 2012. *Birokrasi dan Politik*. Semarang: UPT UNDIP Press.
- Muhammad. 2018. *Birokrasi (Kajian Konep, Teori Menuju Good Governance)*, Unimal Press. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mustanir, A. 2022. *Pelayanan Publik*. Pasuruan: CV. Basya Media Utama & CV. Penerbit Qiara Media. Available at: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Mustanir, A. and Darmiah, D. 2016. 'Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), pp. 225–238. Available at: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>.
- Nengsih, N.S. *et al.* 2023. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

- Ramadhani, M.M. *et al.* 2022. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ramadhanti, R. 2018. 'Politik dan Birokrasi Pemerintahan', *Jurnal Trias Politika*, 2(1), pp. 96–104. Available at: <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1242>.
- Ravyansah *et al.* 2021. *Pengantar Ilmu Politik*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. Available at: https://play.google.com/store/books/details/Ravyansah_Pengantar_Ilmu_Politik?id=8nOYEAAAQBAJ&hl=id&gl=US.
- Rusfiana, Y. and Supriatna, C. 2021. *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan, Alfabeta Bandung*. Bandung: CV Alfabeta.
- Saksono, H. *et al.* 2022. *Governansi Digital, CV. MEDIA SAINS INDONESIA*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA. Available at: https://books.google.co.id/books/about?id=m_yUEAAAQBAJ.
- Satispi, E. and Kurniasih. 2019. *Buku Ajar Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. UMJ Press. Available at: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

BAB 4

PERTANGGUNGJAWABAN

BIROKRASI

Oleh Nur Rohim Yunus

4.1 Pendahuluan

Yang dimaksud dengan “birokrasi” adalah sistem atau struktur organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas negara dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Birokrasi dituntut untuk memikul tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan penilaian yang dibuatnya karena merupakan institusi yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan di masyarakat.

Salah satu dari banyak peran yang dimainkan birokrasi baik dalam pemerintahan maupun masyarakat adalah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa Birokrasi berperan penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab negara, termasuk pemeliharaan ketertiban hukum, penyediaan pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan negara. Kebijakan pemerintah pada akhirnya menjadi tanggung jawab birokrasi, karena merekalah yang bertugas menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu, birokrasi berfungsi untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam operasinya. Dalam situasi ini, birokrasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kewajibannya dilaksanakan secara adil dan efektif. Birokrasi berkewajiban memberikan pelayanan publik yang bermutu, merata, dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa

terkecuali. Birokrasi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya negara secara efektif dan efisien.

Selain itu, birokrasi juga bertanggung jawab untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, keputusan yang harus diambil oleh birokrasi harus didasarkan pada hukum dan kebijakan yang berlaku. Birokrasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepentingan terbaik publik. Integritas dan etika adalah salah satu fungsi birokrasi yang harus dijunjung tinggi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, birokrasi bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan etikanya. Birokrat dituntut untuk menjalankan pekerjaannya secara jujur, adil, dan tidak diskriminatif. Birokrasi bertanggung jawab untuk menjaga reputasinya dan memastikan tidak ternoda oleh tindakan nepotisme, kolusi, atau korupsi.

Satu peran penting lainnya yang dimainkan oleh birokrasi adalah memfasilitasi keterlibatan masyarakat umum dalam proses perumusan kebijakan publik dan penyampaian layanan publik. Agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik dan memantau kinerja birokrasi, maka birokrasi harus membuka ruang partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan.

Birokrasi berperan penting dalam masyarakat dengan mendukung kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Ini adalah pekerjaan penting bagi birokrasi untuk bermain. Masyarakat dapat memperoleh hak-haknya secara wajar dan tidak merasa dirugikan oleh birokrasi jika pelayanan publik yang berkualitas dan merata disediakan oleh birokrasi.

4.2 Jenis Tanggung Jawab Birokrasi

Tanggung jawab administratif dan hukum adalah dua kategori utama tugas birokrasi yang biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintah. Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, tanggung jawab administrasi meliputi proses pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan barang milik negara. Sementara itu, tanggung jawab hukum mengacu pada proses memenuhi kewajiban hukum seseorang dan memprakarsai proses hukum yang sesuai untuk memastikan bahwa lembaga pemerintah beroperasi sesuai dengan hukum.

Pembuatan kebijakan, penyusunan laporan, dan administrasi sumber daya manusia adalah contoh tugas administrasi birokrasi. Contoh lain termasuk prosedur penganggaran dan manajemen keuangan. Sementara itu, beberapa contoh tanggung jawab hukum birokrasi meliputi pemenuhan kewajiban hukum seperti pelaporan dan pengembalian pajak, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Artikel "Tanggung Jawab Administrasi dan Hukum Birokrasi Merupakan Elemen Penting dalam Memastikan Kinerja Efektif Instansi Pemerintah" oleh Frederickson, H. George, dan Davis, G. Brian, yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah *peer-review "Public Administration Review,"* menegaskan bahwa salah satu faktor terpenting dalam memastikan kinerja instansi pemerintah efektif. Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa tanggung jawab administratif birokrasi dan tanggung jawab hukum birokrasi saling terkait dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, penting bagi instansi pemerintah untuk memahami perbedaan antara kedua jenis tanggung jawab ini dan mengelolanya dengan baik. (Frederickson & Davis 1984)

4.3 Mekanisme untuk menjamin akuntabilitas birokrasi

Kemampuan suatu instansi atau birokrasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambilnya, serta kemampuan untuk memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas keputusan atau tindakan tersebut, disebut sebagai akuntabilitas birokrasi. Para ahli percaya bahwa memaksakan akuntabilitas pada birokrat adalah salah satu elemen paling mendasar dari tata kelola yang baik dan berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi birokrasi.

Para ahli telah memberikan gambaran tentang akuntabilitas birokrasi sebagai berikut:

1. Menurut Svava (2015), akuntabilitas birokrasi adalah kapasitas lembaga atau birokrasi pemerintah untuk menjawab publik dan otoritas atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil atas nama lembaga atau birokrasi.
2. Menurut Romzek dan Dubnick (1987), akuntabilitas birokrasi adalah kapasitas instansi pemerintah untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan mengenai proses dimana pilihan dan tindakan dibuat, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan tersebut, dan apa konsekuensi dari keputusan dan tindakan tersebut.
3. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas birokrasi adalah kapasitas entitas pemerintah atau birokrasi untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan publik atas kinerja mereka melalui penerapan instrumen kontrol atau pengawasan.

Secara umum, memastikan bahwa keputusan dan tindakan birokrasi selalu berpihak pada kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan dapat dicapai

melalui penerapan akuntabilitas birokrasi yang merupakan kunci penting untuk menjaga transparansi dan integritas pemerintahan.

Ada berbagai mekanisme untuk mempertahankan tanggung jawab di dalam birokrasi, seperti:

1. **Transparansi:** Birokrasi harus melakukan tindakan yang terbuka dan transparan jika ingin menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan posisinya, yang keduanya merugikan masyarakat.
2. **Pelaporan:** Birokrasi wajib memberikan laporan tentang tindakan dan hasilnya secara tepat waktu dan terbuka secara berkala. Publik serta pemerintah dapat memanfaatkan laporan ini untuk membantu memantau efisiensi birokrasi.
3. **Evaluasi Kinerja:** Birokrasi dituntut untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang dijalkannya telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak yang diharapkan.
4. **Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat harus diberikan banyak kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan dan proses pengambilan keputusan yang diawasi oleh birokrasi. Keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan birokrasi berpotensi meningkatkan kepercayaan dan transparansi.
5. **Pengawasan:** Untuk mencegah terjadinya korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi, masyarakat dan aparat perlu melakukan pengawasan terhadap lembaga ini.

Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi dan platform online, adalah salah satu contoh mekanisme yang termasuk dalam kategori ini. Mekanisme tersebut mendorong

akses publik terhadap informasi dan pelaporan. Selain itu, ada undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang memastikan bahwa proses birokrasi terbuka untuk pengawasan publik dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Rao, P. Surya Prakasa berpendapat bahwa untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi, proses yang menjamin akuntabilitas birokrasi perlu dilakukan secara efektif dan konsisten. Lebih lanjut ia menegaskan, pelaksanaan mekanisme ini harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna membangun sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel. (Rao, 2012)

4.4 Dampak akuntabilitas birokrasi bagi pelayanan publik

Akuntabilitas proses birokrasi sangat penting untuk peningkatan tingkat kualitas yang diberikan oleh layanan publik. Berikut ini adalah beberapa implikasi akuntabilitas dalam birokrasi terhadap pelayanan publik: (Tripathi & Kapoor 2017).

1. Peningkatan transparansi: Penyediaan layanan publik dapat memperoleh manfaat dari peningkatan transparansi ketika akuntabilitas birokrasi diterapkan. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan terkini tentang kebijakan dan kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik jika ada kerangka akuntabilitas yang transparan.
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas: Akuntabilitas di dalam birokrasi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian layanan publik. Terbentuknya mekanisme pemantauan dan penilaian kinerja akan menyebabkan birokrasi lebih berhati-hati dan

- hati-hati dalam mengambil keputusan dan mengambil tindakan, dengan tujuan untuk menekan sebanyak mungkin kesalahan dan penyalahgunaan wewenang.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Akuntabilitas dalam birokrasi berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat baik kepada pemerintah maupun birokrasi. Masyarakat dapat lebih percaya bahwa pemerintah dan lembaga birokrasi lainnya benar-benar bekerja untuk kebaikan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan ketika ada sistem akuntabilitas yang transparan.
 4. Peningkatan partisipasi masyarakat: Akuntabilitas dalam birokrasi juga dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dari masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan publik. Jika ada prosedur akuntabilitas dan transparansi, masyarakat akan lebih mudah untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Jika dilihat secara keseluruhan, akuntabilitas birokrasi sangat berpotensi untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat dan negara.

4.5 Tantangan dalam menjalankan akuntabilitas birokrasi

Baik birokrasi maupun pemerintah perlu mengatasi sejumlah kendala agar berhasil melaksanakan langkah-langkah akuntabilitas birokrasi. Berikut adalah beberapa kesulitan yang dapat muncul ketika mencoba menerapkan akuntabilitas birokrasi: (Lee, 2018), (Ritzer, 2017), (Zafarullah & Chaudhry, 2019).

1. Kompleksitas regulasi: Peraturan yang harus dipatuhi oleh birokrasi seringkali berbelit-belit dan sulit dipahami. Oleh karena itu, dapat menjadi tantangan bagi birokrasi untuk memastikan bahwa peraturan dipatuhi dan bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Keterbatasan sumber daya: Birokrasi sering berurusan dengan sumber daya yang terbatas, baik keuangan atau dalam hal jumlah pekerja yang tersedia. Karena keterbatasan ini, mungkin menjadi tantangan bagi birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas secara efektif.
3. Resistensi birokrasi: Ada elemen-elemen tertentu dari birokrasi yang resisten terhadap perubahan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas. Karena penentangan ini, penerapan akuntabilitas dapat menjadi lebih sulit dan memakan waktu lebih lama.
4. Ketergantungan pada politik: Ada kemungkinan bagi birokrasi untuk menjadi terlalu tergantung pada perubahan kebijakan politik pada waktu-waktu tertentu. Keberhasilan jangka panjang dalam menerapkan langkah-langkah akuntabilitas dapat terhambat akibat hal ini.

Ada banyak pilihan yang tersedia untuk menjawab persoalan yang muncul dengan melaksanakan akuntabilitas birokrasi, antara lain sebagai berikut: (Gheorghie, 2021), (Kuncoro, 2019), Sari & Susanto, 2018)

1. Memperjelas regulasi: Pemerintah dapat menjelaskan dan menyederhanakan peraturan agar lebih mudah dipahami oleh birokrasi dan meningkatkan kemungkinan untuk dipatuhi.
2. Mengoptimalkan sumber daya: Pemerintah mampu mendedikasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan akuntabilitas proses birokrasi berjalan lancar. Selain itu, birokrasi juga bertanggung jawab untuk

- memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia dengan sebaik-baiknya.
3. Melakukan edukasi dan pelatihan: Birokrasi dapat dididik dan dilatih oleh pemerintah, yang akan meningkatkan pemahaman mereka tentang persyaratan akuntabilitas dan kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan tersebut.
 4. Memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian: Untuk memastikan bahwa tingkat akuntabilitas birokrasi yang tinggi dipertahankan, pemerintah dapat bekerja untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian.
 5. Mengurangi ketergantungan pada politik: Ketergantungan birokrasi pada kebijakan politik dapat dikurangi jika pemerintah mengembangkan kebijakan yang didasarkan pada bukti dan fakta serta membangun sistem pengawasan yang mandiri.

4.6 Penutup

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pelayanan publik berkembang ketika birokrat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Memiliki birokrasi yang lebih akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus meningkatkan penyampaian layanan. Pelaksanaan akuntabilitas birokrasi diperumit oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya sumber daya, regulasi yang ambigu, dan peran politik yang lebih besar. Maka, solusi yang tepat, seperti memperjelas legislasi, mengoptimalkan sumber daya, memberikan pendidikan dan pelatihan, memperkuat sistem pengawasan dan kontrol, serta mengurangi ketergantungan pada politik, diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Akuntabilitas dalam birokrasi sangat signifikan dalam ranah pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan kerangka

regulasi yang jelas, sistem pengawasan yang kuat, serta kemampuan dan keterampilan yang memadai bagi birokrasi agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar birokrasi bertanggung jawab dan efisien dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tantangan dalam melaksanakan akuntabilitas birokrasi dapat diselesaikan dalam lingkungan yang rumit dan selalu mengalami perubahan, asalkan upaya untuk melakukannya konsisten dan tidak tergoyahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aragon-Correa, J. A., Rubio-Lopez, E., & Hurtado-Torres, N. 2015. Proactive environmental strategies and employee inclusion: The positive effects of information-sharing and transparency on environmental performance. *Journal of Business Ethics*, 125(4), 667-680.
- Bovens, M. 2007. Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework. *European Governance Papers (EUROGOV)*, (C-07-02), 1-27.
- Frederickson, H. G., & Davis, G. B. (1984). Accountability and the future of public administration. *Public Administration Review*, 44(2), 129-139.
- Gheorghe, I. R. 2021. Accountability in Public Administration: Solutions for Improving Governance in the Romanian Public Sector. *Administrative Sciences*, 11(1), 15.
- Kuncoro, R. S., & Sari, S. P. 2019. Challenges of Public Sector Accountability: A Case Study of Public Service Agencies in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(9), 766-777.
- Lee, J. 2018. Challenges of Accountability in Public Administration. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(2), 218-223.
- Rao, P. S. P. 2012. Accountability in governance: A study on mechanism to ensure accountability in governance. *International Journal of Public Administration*, 35(13), 881-889.
- Ritzer, G. 2017. The Challenges of Accountability in the Public Sector. *Public Administration Review*, 77(5), 667-671.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. 1987. Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227-238.

- Sari, S. P., & Susanto, H. 2018. Building Accountability System in Public Sector: A Review on Theory and Practice. *Journal of Accounting and Business Education*, 3(1), 41-50.
- Suyanto, M., & Syahza, A. 2018. The Effect of Accountability and Transparency on Public Service Performance with the Moderation of Internal Control System. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(1), 232-248.
- Svara, J. H. 2015. The Puzzle of Accountability and Performance in Local Government. *International Public Management Journal*, 18(1), 39-63.
- Tripathi, S., & Kapoor, R. 2017. The Role of Accountability in Good Governance: An Empirical Study. *International Journal of Public Administration*, 40(1), 1-13.
- Zafarullah, H., & Chaudhry, S. K. 2019. Public Accountability and Governance Challenges in Developing Countries: An Empirical Analysis. *Public Administration and Development*, 39(2), 77-88.

BAB 5

BIROKRASI DAN APARATUR NEGARA

Oleh Ade Putra Ode Amane

5.1 Konsep, Dinamika, dan Problematika Reformasi Birokrasi

5.1.1 Konsep Reformasi Birokrasi

Dengan konsep “Ideal type of organization” Weber melukiskan sebagai badan administrasi pejabat yang diangkat. Oleh karenanya Weber dalam (Ramadhanti, 2018) lebih menegaskan ciri-ciri birokrasi sebagai berikut:

- a) Adanya pembagian pekerjaan, hubungan kewenangan dan tanggung jawab yang di definisikan dengan jelas.
- b) Kantor diorganisasikan secara hierarki atau adanya rantai komando.
- c) Kualifikasi profesional dipilih sebagai eksekutif, yang ditentukan berdasarkan pelatihan dan ujian.
- d) Aturan dan kesepakatan mengarah pada pemenuhan pekerjaan.
- e) Hubungan antara pimpinan dan pegawai bersifat impersonal
- f) Pegawai yang berorientasi pada karier dan menerima gaji yang tepat .

Riyadi (2008) dalam (Bambang Triyono *et al.*, 2013) menjelaskan bahwa birokrasi merupakan salah satu unsur administrasi negara yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti regulasi, perijinan, pelayanan publik dan

pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Peran, fungsi dan otoritas yang dimiliki inilah yang menjadikan birokrasi sebagai organisasi yang sangat strategis.

Birokrasi adalah suatu organisasi dalam pemerintahan yang merupakan mata rantai administrasi untuk membantu tercapainya tujuan pemerintah yaitu melayani masyarakat. Organisasi yang baik, efektif, efisien dan tepat harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam organisasi tersebut dengan kata lain birokrasi yang baik harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan, (Setiawan, Sururama and Nurdin, 2022).

Dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan, sifat dan lingkup pekerjaannya, serta kewenangan yang dimilikinya birokrasi menguasai aspek-aspek yang sangat luas dan strategis. Administrasi mengontrol otoritas atas akses, seperti sumber daya alam, anggaran, karyawan, proyek, dan mengontrol akses ke pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain.

Dengan posisi, kemampuan dan kewenangan tersebut, birokrasi tidak hanya memiliki peluang besar untuk membuat kebijakan yang benar secara teknis, tetapi juga dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, birokrasi dan aparaturnya juga memiliki berbagai keahlian teknis khusus yang tidak dimiliki oleh unit-unit di luar birokrasi, seperti dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan infrastruktur, pemberian pelatihan, pengaturan lalu lintas dan masalah lainnya.

Birokrasi Indonesia juga memegang peranan penting dalam semua tahapan proses pengambilan keputusan, mulai dari perumusan, pelaksanaan dan pemantauan berbagai kebijakan publik, serta evaluasi efektivitasnya. Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa birokrasi Indonesia memainkan peran yang cukup besar. Besar kecilnya peran birokrasi juga

menentukan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program dan kebijakan pembangunan. Jika birokrasi buruk, pekerjaan pembangunan pasti akan menghadapi banyak kendala. Sebaliknya, ketika birokrasi berjalan dengan baik, maka program-program pembangunan akan berjalan lebih lancar. Pada level ini, birokrasi merupakan salah satu prasyarat utama keberhasilan pembangunan.

Peran birokrasi sebagai fungsi penyelenggaraan negara dipenuhi oleh birokrasi. Birokrasi dengan demikian diartikan sebagai keseluruhan lembaga penyelenggaraan negara yang meliputi aparatur negara, aparatur administrasi, dan sumber daya manusia birokrasi yang terdiri dari pejabat negara dan pegawai negeri sipil.

Dalam kosa kata, birokrasi berarti kesempurnaan negara, yang meliputi terutama bidang kelembagaan, administrasi, dan manusia yang bertugas mengatur proses administrasi sehari-hari. Secara umum, pembangunan birokrasi mencakup berbagai tindakan terencana yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dalam pelaksanaan tugasnya (Adi Suryanto, 2012) dalam (Bambang Triyono *et al.*, 2013).

Pembangunan birokrasi yang bersih dan bebas KKN berdampak pada seluruh jajaran birokrasi, tidak hanya pejabat/birokrasi, tetapi meliputi pembangunan struktur, sistem, proses bisnis dan moral/etika. Perkembangan birokrasi terjadi sesuai rencana melalui proses multidimensi yang disebut bentuk birokrasi. Terutama Presiden memutuskan (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand tentang Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, 2010). Dari sisi konten, upaya penataan pembangunan birokrasi yang komprehensif tersebut sangat penting oleh Sofian Effendi (2010) (Bambang Triyono *et al.*, 2013) disebut reformasi birokrasi.

5.1.2 Dinamika Reformasi Birokrasi

Terkait dengan dinamika reformasi administrasi negara, di Indonesia reformasi birokrasi pemerintah merupakan bagian dari tuntutan reformasi secara total yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan hukum (Riyadi, 2008). Riyadi mengutip pendapat Tjokroamidjojo (2001) dalam (Bambang Triyono *et al.*, 2013) yang mendefinisikan reformasi sebagai berikut: “reformasi dari suatu sistem dan budaya politik yang paternalistik, otokratik, monolitik dan sentralistik dengan regimentasi terlalu kuat dan KKN, ke arah suatu sistem dan budaya politik yang lebih terbuka, demokratis, egaliter dan toleran, dimana pemeran utama ekonomi adalah masyarakat dalam sistem pasar yang lebih fair”.

Dengan merujuk pada Buku Putih Reformasi Administrasi Negara yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara (2010) dalam (Bambang Triyono *et al.*, 2013), dinamika reformasi administrasi negara memiliki 4 (empat) dimensi penting, yaitu:

- a) Kelembagaan: desentralisasi, penataan organisasi dan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b) Ketatalaksanaan: Akuntabilitas, Transparansi, Penegakan hukum, Orientasi pasar, Pelayanan berorientasi publik, dan E-Government;
- c) Sumberdaya Aparatur: Paradigma manajemen SDM, dan manajemen kepegawaian daerah; dan
- d) Pola hubungan birokrasi dengan lingkungan politik, ekonomi, masyarakat sipil dan masyarakat Internasional.

5.1.3 Problematika Reformasi Birokrasi

Irfan Islamy (1997) dalam (Bambang Triyono *et al.*, 2013) mengemukakan bahwa upaya untuk mereformasi birokrasi merupakan sebuah agenda publik yang tidak terelakkan. Dalam tataran konseptual, idealnya, sebuah

reformasi birokrasi diarahkan untuk mengakomodasi sejumlah karakter dasar dari Birokrasi, yakni:

- a) Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.
- b) Birokrasi harus melakukan pembenahan organisasi yang bercirikan organisasi yang modern, ramping, efisien dan efektif, mampu membedakan antara tugas yang dikerjakan sendiri dan yang tidak dikerjakan sendiri, termasuk pembagian tugas kepada masyarakat.
- c) Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerja yang lebih sesuai dengan karakteristik organisasi modern, yaitu: layanan cepat, akurat, tepat, terbuka dengan tetap menjaga kualitas, efektivitas biaya dan ketepatan waktu.
- d) Birokrasi harus memosisikan diri sebagai inisiator pelayanan publik dan bukan sebagai penguat.
- e) Birokrasi harus mampu dan mau berubah dari birokrasi tindakan yang kaku menjadi organisasi birokrasi dengan struktur yang lebih terdesentralisasi, inovatif, fleksibel dan responsif.

Namun, upaya untuk melakukan reformasi birokrasi tersebut tidak mudah dan bersifat kompleks karena harus menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan. Dalam perspektif politik, Siti Zuhro (2012) dalam (Bambang Triyono *et al.*, 2013) mengemukakan bahwa tantangan pembangunan sistem dan standar kerja birokrasi yang profesional berasal baik dari lingkungan internal dan eksternal birokrasi. Dilihat dari lingkungan internal, terdapat dua hambatan utama. Pertama, budaya birokrasi. Budaya itu terwujud dalam perilaku yang korup dan tidak berorientasi pada pelayanan. Kedua, di

Indonesia kelompok birokrat sudah lama menjadi kelompok kepentingan ekonomi. Implikasi dari tantangan internal ini menjadikan sistem dan standar kerja birokrasi yang profesional yang coba dibangun menjadi tidak mudah. Sementara itu, dari sisi eksternal, hambatan tersebut terutama berasal dari politisi dan partai politik. Bagi mereka birokrasi dipandang sebagai sarana untuk memperoleh dan melanggengkan kekuasaan. Di era Orde Baru, misalnya, pegawai negeri sipil (PNS) dan birokrasi telah dijadikan sebagai mesin politik. Birokrasi yang mestinya bekerja secara efisien dan efektif dalam melayani dan mewujudkan kesejahteraan rakyat berubah menjadi semacam kekuatan politik yang mengejar target partai dan rezim yang berkuasa.

Meskipun birokrasi memiliki kelebihan dalam menjaga agar roda organisasi tetap berputar, namun tidak terlepas dari kelemahan yang sebenarnya. Kritik oleh Warren Bennis (dalam Myers and Myers, 1988: 31) (Susanto, 2017) terhadap birokrasi, pada intinya adalah, walaupun birokrasi tentang birokrasi secara umum, meskipun birokrasi selalu berkaitan dengan tatanan organisasi, namun tidak dapat sepenuhnya memperbaiki birokrasi. Beberapa faktor dicegah, mis. Birokrasi tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan kepribadian yang matang karena terlalu banyak metode kerja dan kekakuan struktural. Kembangkan lebih banyak kompromi (kesatuan) dan pemikiran kelompok dengan berbagai komitmen yang sulit.

5.1.4 Indikator Capaian Reformasi Birokrasi

Adi Suryanto (2012) (Bambang Triyono *et al.*, 2013) beberapa indikator program RB yang digunakan sebelumnya, mis Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Opini BPK (WTP), Integritas Pelayanan Publik, Peringkat Kemudahan Berusaha,

Government Effectiveness Index, maupun Instansi pemerintah yang akuntabel (SAKIP), belum memberikan gambaran secara komprehensif atas pencapaian dengan sampling pada kota-kota tertentu, dan dinilai tidak mampu menggambarkan kondisi seluruhnya. Indikator lain, opini WTP juga ternyata tidak menjamin bahwa tidak ada korupsi di pemerintah/pemerintah daerah. Meski beberapa berbagi indikator masih dapat dimanfaatkan, namun upaya pembangunan birokrasi memerlukan indikator yang lebih komprehensif.

5.2 Birokrasi Administrasi

Birokrasi merupakan sistem administrasi di dalam suatu organisasi yang memiliki fungsi dalam penyelenggara pemerintahan dan memberikan pelayanan publik melaksanakan tugas rutin secara tersusun dalam susunan yang jelas berdasarkan pada aturan yang telah tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Birokrasi berperan sebagai pelaku birokrasi dengan fungsi administrasi negara. Termasuk dalam kelembagaan tersebut adalah dari pemerintahan negara, seperti aparatur negara, aparatur pemerintah, dan sumber daya manusia birokrasi seperti pejabat pemerintah dan pegawai negeri sipil.

Birokrasi memegang peranan penting dalam kehidupan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Contoh pentingnya birokrasi adalah ketika orang tua kita menikah, mereka harus melakukan administrasi di kantor KUA. Bagaimanapun, ketika kita dalam kandungan, kita diperiksa di puskesmas atau rumah sakit, yang merupakan turunan dari pelayanan kesehatan yang tidak dapat dipisahkan dari rantai birokrasi. Dalam hal pendidikan, hal ini tentu saja terkait dengan dinas pendidikan, bahkan setelah kematian kita masih terlibat dalam upacara pemakaman yang merupakan

lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi tidak dapat dipisahkan dari rutinitas dan kehidupan kita sehari-hari (Osborne & Gaebler, 1996) (Latif et al., 2020) (Mustanir et al., 2019) (Agus Hendrayady et al., 2022).

Keberadaan birokrasi sebagai konsekuensi yang logis dari tugas utama sebuah negara/pemerintahan dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Negara ditekankan dapat terlibat dalam membuat sebuah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rakyatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan dalam kondisi tertentu negara memberikan sebuah putusan yang terbaik bagi rakyatnya. Olehnya negara/pemerintahan membuat sistem administrasi yang tujuannya untuk merespon kebutuhan dari rakyatnya yang disebut sebagai birokrasi. Birokrasi bagi sebagian orang diartikan sebagai prosedur yang rumit, menyulitkan dan bertele-tele. Tetapi sebagian orang lain berpendapat birokrasi dapat dimengerti dari perspektif yang positif yakni upaya dalam mengelola dan membimbing masyarakat supaya lebih bisa mengendalikan berbagai sumber daya, serta menyebarkan sumber daya tersebut untuk lebih merata (Saidiman et al., 2020) (Frederickson & Smith Kevin, 2004) (Agus Hendrayady et al., 2022).

5.2.1 Tujuan dan Fungsi Birokrasi

Birokrasi bertujuan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintahan, kerjasama antar lembaga dan negara. Berikut tujuan birokrasi:

- a) Menjalankan program atau kegiatan yang bertujuan mewujudkan visi dan misi pemerintah/negara.
- b) Memberi layanan masyarakat dan melaksanakan pembangunan.
- c) Mengimplementasikan seluruh aspek pengendalian pemerintah, mulai aspek perencanaan, pencegahan, koordinasi, pengawasan, dan penilaian.

- d) Menjadikan seluruh layanan dan perlindungan mudah diakses oleh masyarakat.
- e) Menjamin terselenggaranya keberlangsungan sistem pemerintahan sebuah negara.
- f) Mendukung, mempercepat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pemerintah/bernegara.

Birokrasi administrasi bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan maksimal kepada masyarakat dengan berupaya meningkatkan kualitas Sumber Dayanya hingga dapat memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Birokrasi administrasi selain memiliki fokus pada pelayanan publik juga memiliki fungsi sebagai motor penggerak pembangunan dan aktivitas pemberdayaan masyarakat (Sapri et al., 2020) (Agus Hendrayady *et al.*, 2022).

Birokrasi administrasi juga menginginkan suatu jaminan akan terlaksananya birokrasi di bidang lain yang dapat mengimplementasikan konsep administrasi pembangunan. Hal ini perlu direkomendasikan pada aspek seperti kelembagaan dan ketatalaksanaan, sumber daya, dan pengawasan dalam pelaksanaan tupoksinya. Melalui organisasi kelembagaan dilakukan perampingan struktur organisasi birokrasi guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan sesuai tupoksinya (Jamal et al., 2020) (Agus Hendrayady *et al.*, 2022).

Profesionalisme dalam menjalankan tupoksi merupakan usaha untuk mendorong peningkatan kompetensi aparat birokrasi dengan memperhatikan hal-hal seperti:

- a) Meningkatkan kesejahteraan aparat birokrasi administrasi.
- b) Meningkatkan etika dan moral birokrasi administrasi.
- c) Meningkatkan profesionalisme birokrasi administrasi.

Andrew Heywood (Rusfiana & Suprianta, 2021) (Agus Hendrayady *et al.*, 2022) mengemukakan birokrasi memiliki beberapa fungsi dalam pandangan kajian administrasi yaitu:

- a) Pelaksanaan Administrasi. Fungsi utama dalam birokrasi yakni mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan peraturan perundangan.
- b) Nasihat Kebijakan. Peran utamanya dalam memberikan nasihat kebijakan kepada pemerintah. Hal ini terjadi karena birokrasi menjadi lini terdepan dan utama dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.
- c) Artikulasi Kepentingan. Birokrasi melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok kepentingan seperti partai politik.
- d) Stabilitas Politik. Fungsi ini sebagai stabilisator politik, artinya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengimplementasian kebijakan stabilitas dan kontinuitas sistem politik.

Birokrasi administrasi memiliki beberapa fungsi khusus menurut William H. Newman dan Henry Fayol dalam (Agus Hendrayady *et al.*, 2022), yaitu:

- a) Perencanaan (*planning*). Dalam fungsi ini yang dibutuhkan ialah pengumpulan, penyusunan dan mengolah data kemudian ditata perencanaannya dengan baik dan matang.
- b) Pengorganisasian (*organizing*). Fungsi ini digunakan untuk menetapkan pekerjaan, mengatur hubungan kerja dan pembagiannya.
- c) Pemberian bimbingan (*directing*). Fungsi ini memberikan masukan dan saran agar terjadi suatu perbaikan kegiatan yang sedang dilakukan sehingga tercapai hasil yang maksimal.

- d) Pengkoordinasian (*coordinating*). Dalam fungsi ini mengatur segala hal dalam organisasi birokrasi administrasi yang harmonis dan produktif dalam pencapaian tujuan.
- e) Pelaporan (*reporting*). Fungsinya yakni melaporkan sejauh mana pencapaian hasil kegiatan yang direalisasikan apakah sesuai dengan rencana.
- f) Penganggaran (*budgeting*). Fungsi ini berkaitan dengan keuangan yaitu mengatur seluruh rencana tentang anggaran ataupun keuangan yang telah direalisasikan (Latif, Mustanir, et al., 2019b) (Agus Hendrayady *et al.*, 2022).

5.2.2 Ciri-Ciri Birokrasi Administrasi

Pada ciri-ciri birokrasi administrasi banyak memiliki kesesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Max Weber “ideal type of bureaucracy” (Latif, Irwan, et al., 2019) (Mustanir et al., 2020) (Agus Hendrayady *et al.*, 2022) ini diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Rule*. Adanya peraturan dalam pekerjaan dimana peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap pegawai dalam melakukan dan menjalankan pekerjaannya. Peraturan ini akan mendorong birokrasi administrasi pada standar dan profesionalitas disusun sedemikian rupa sesuai regulasi yang berlaku di organisasi.
- b) *Specialization*. Pengkhususan tugas. Merupakan salah satu hal yang penting di dalam birokrasi administrasi, karena dengan adanya pengkhususan tugas akan dapat memudahkan pemimpin mengatur organisasi secara lebih efektif dan efisien. Pengkhususan tugas ini juga akan memberikan batasan tugas dan wewenang bagi setiap posisi di dalam suatu organisasi birokrasi administrasi. Dapat diketahui siapa mengerjakan apa serta siapa yang bertanggung jawab kepada siapa dan apa.

- c) **Formal.** Penyelenggaraan organisasi yang resmi dan formal didasarkan kepada aturan perundang-undangan. Seperti uraian yang disampaikan di atas, disebutkan bahwa organisasi birokrasi merupakan organisasi yang legal dan formal.
- d) **Zakelijk.** Kaku namun sederhana. Kaku berarti setiap kegiatan harus dijalankan atas dasar peraturan atau perintah yang tertulis dengan resmi. Sedangkan yang dimaksud sederhana yaitu tugas-tugas yang dilakukan oleh para birokrat sebenarnya sangat sederhana, namun harus sesuai dengan peraturan resmi yang ada dan dilaksanakan dengan cara yang formal legal.
- e) **Obedience.** Taat dan patuh. Ketaatan dan kepatuhan akan sangat mempengaruhi kinerja dan image dari organisasi dan administrasi tempatnya bekerja. Sikap taat yang dimiliki setiap pegawai akan membuat pandangan akan organisasi tersebut akan lebih baik di mata publik dibandingkan organisasi birokrasi administrasi yang tidak taat dan patuh akan peraturan yang telah ditetapkan. Ketaatan dan kepatuhan juga akan membuat situasi atau lingkungan kerja akan menjadi lebih kondusif, karena para pegawai menyadari akan pentingnya sikap taat dan patuh dalam organisasi birokrasi administrasi tersebut.
- f) **Impersonal.** Sifat tidak pribadi. Ini berarti sebuah organisasi birokrasi administrasi tidak boleh memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pangkat atau kedudukan atau hal lain. Organisasi birokrasi administrasi harus bersikap adil dan tanpa pandang bulu di dalam melayani masyarakat. Hubungan interaksi dalam birokrasi administrasi dilakukan melalui prosedur dan formalitas.
- g) **Systematic.** Terstruktur dan sistematis. Setiap hal yang dilakukan di dalam organisasi birokrasi administrasi sudah diatur sedemikian rupa dan secara sistematis. Ini akan

memudahkan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, karena pegawai tersebut sudah mengetahui tugas apa yang akan ia jalankan, wewenang apa yang ia miliki, dan tugas mana saja yang bukan menjadi bagiannya, dan sebagainya. Hal seperti ini akan membuat organisasi birokrasi administrasi menjadi lebih sistematis dan terstruktur.

- h) *Discipline*. Tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan. Ini berarti semua gerak dan tugas di dalam birokrasi administrasi didasarkan pada aturan, sebagai landasan hukum.

5.2.3 Perilaku Birokrasi

Perilaku Birokrasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara individu-individu sebagai aparatur pemerintah daerah dengan organisasi dimana ia beraktivitas setiap saat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk memahami birokrasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Individu membawa ke dalam tatanan birokrasi, kemampuannya, kemauan, kepercayaan pribadi, pengharapan, nilai-nilai, persepsi, termasuk kebutuhan dan pengalamannya. Hal Ini merupakan karakteristik individu, dan karakteristik itu akan terbawa juga ketika individu tersebut memasuki suatu lingkungan baru, misalnya memasuki birokrasi atau organisasi pemerintah, (Maniagasi, 2016).

5.2.4 Dimensi Perubahan Institusi Birokrasi

Dalam literatur manajemen perubahan dikenal dengan model (Lewin, 1951) (Warsono, 2020). Lewin mengembangkan sebuah konsep force field analysis. Konsep ini merupakan teknik untuk melihat gambaran utama yang melibatkan semua kekuatan yang berjalan sejalan dan yang menghalangi perubahan. Menurut Kurt Lewin, perubahan disebabkan oleh

tekanan pada organisasi, individu atau kelompok. Ia berfokus pada pernyataan “mengapa”, yaitu mengapa individu, kelompok atau organisasi berubah. Dari sana, dia menemukan cara mengelola perubahan dan membuat perbedaan. Lewin menyimpulkan bahwa kekuatan pendorong menghadapi perlawanan terhadap perubahan. Perubahan itu sendiri dapat terjadi dengan memperkuat “driving forces” atau dengan melemahkan “resistance to change”.

Menurut Lewin, transformasi birokrasi baru menuju normal baru merupakan kekuatan eksternal yang menuntun perubahan dalam tubuh birokrasi. Melihat situasi pandemi Covid-19, diharapkan birokrasi bisa beradaptasi dan cepat tanggap. Padahal industri masih menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh birokrasi seperti Birokrasi yang lamban dalam merespons dan enggan mengambil keputusan sehingga menimbulkan inefisiensi dalam penyampaian kepada masyarakat. Ada fakta lain bahwa terdapat ego sektoral antara kementerian/lembaga dan daerah yang tidak selaras, bahkan bertentangan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

5.3 Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja

Dengan berjalannya reformasi birokrasi, pelayanan publik lebih dituntut untuk dapat bersifat profesional, yang artinya pelayanan publik yang memiliki akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah); efektif mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran; sederhana, yaitu prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, akurat, sederhana, mudah dipahami dan mudah diimplementasikan oleh orang yang meminta layanan; jelas dan yakin tentang prosedur/prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, unit kerja dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pemberian pelayanan, biaya/tarif pelayanan. dan

Prosedur pembayaran dan jadwal pemberian layanan; terbuka, artinya segala hal yang berkaitan dengan proses pelayanan harus dikomunikasikan secara terbuka, sehingga mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik dikehendaki maupun tidak; Efisien; tepat waktu reaktif; dan mudah beradaptasi.

Selain itu, organisasi publik (birokrasi) juga harus memiliki struktur dan prosedur yang fleksibel, serta memiliki kemauan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan diri, menyesuaikan diri dengan situasi dinamis, dan ketidakpastian lingkungan. Kemauan dan kemampuan tersebut hanya bisa dicapai apabila para pelaku organisasi (birokrasi) dapat menyesuaikan perubahan dan perkembangan masalah yang timbul, mengidentifikasi, dan memobilisasi sumber-sumber dana riil maupun potensial.

UNDP dalam (Rudito *et al.*, 2016) mengajukan karakteristik *good governance* yang ideal, sebagai berikut: participation (setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif), rule of law (kerangka hukum harus adil, terutama hukum untuk HAM), transparency yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, responsiveness dari setiap lembaga untuk melayani stakeholders, consensus orientation (sebagai perantara dalam memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan umum, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur), equity, effectiveness and efficiency, accountability (bergantung kepada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi), serta strategic vision mengenai pengembangan manusia yang sejalan dengan pembangunan yang direncanakan.

Birokrasi pada awalnya tumbuh dan berkembang sebagai suatu tatanan yang merupakan kebutuhan alami yang

harus mampu menjamin sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Birokrasi di Indonesia berada pada tingkat pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan sehingga yang menjadi sorotan adalah birokrasi pemerintahan sebagai sebuah sistem, tatanan dari yang paling atas hingga paling bawah. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keberadaan birokrasi, seperti mental, perilaku, karakteristik, dan kinerjanya. Pelayanan birokrasi kepada publik menjadi keutamaan tugas rutin yang harus terdapat dalam setiap organisasi. Sehingga sering kali orang awam menilai bahwa birokrasi identik dengan pelayanan publik yang diterima masyarakat. Sebagai sebuah konsep yang ideal, maka birokrasi dalam pemerintahan Indonesia menjadi fokus bagi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menjadikan aparatur negara lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menangani tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sesuai dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Salah satu hasil reformasi birokrasi adalah pelayanan yang lebih baik, jelas dan tidak rumit. Pengertian dan tujuan bentuk birokrasi adalah proses perubahan proses dan cara kerja birokrasi publik serta sikap dan perilaku birokrat untuk mencapai efisiensi birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Inti dari bentuk birokrasi pada dasarnya mengandung dua aspek. Pertama, mengubah seluruh mekanisme kerja agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel. Jadi, yang diubah dalam reformasi birokrasi adalah sistemnya, atau bagaimana sebuah mekanisme kerja lebih

terukur dan akuntabel, serta seluruh bagian atau unit kerja harus bekerja dengan baik. Kedua, semua sumber dayanya, terutama sumber daya manusia, akan diperbarui. Aspek lain adalah efek dari reformasi pertama. Dalam menempatkan orang juga harus sangat terukur, dan kompetensinya harus relevan, (Fajrillah *et al.*, 2022).

5.4 Birokrasi Berbasiskan Human Capital

Dengan berjalannya reformasi birokrasi, tantangan selanjutnya adalah implementasi birokrasi meritokrasi, di mana para pemimpin bangsa seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan maupun prestasi yang mereka miliki. Sistem meritokrasi erat kaitannya dengan profesionalisme, karena pemerintahan yang berlandaskan prinsip ini sepenuhnya hanya akan memilih pemimpin yang secara teruji telah memiliki kemampuan dan kualifikasi yang terbaik dalam hal kecakapan (merit) dan keterampilannya (skill). Tentunya hal ini tidak mudah karena masih banyak praktik KKN yang terjadi dalam tubuh organisasi pemerintahan.

Sistem meritokrasi telah diatur dalam (*Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, 2014) Pasal 1 ayat 22, yang didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan tindakan yang adil dan pantas terlepas dari latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status perkawinan, usia atau cacat. Pada saat yang sama, modal manusia mencerminkan kemampuan kolektif organisasi untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh anggota organisasi tersebut. Pada UU ASN Pasal 51 yang mengatur tentang konsep pengembangan human capital, menyatakan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem meritokrasi.

Aplikasi meritokrasi tidaklah sempurna karena mungkin tidak dapat mengakomodasi individu-individu yang memiliki keterampilan mumpuni tetapi tidak berkesempatan untuk mengenyam tingkat pendidikan tertentu (kompeten secara akademis). Namun sistem ini dapat menjadi angin segar untuk digunakan dalam mengukur kinerja pemerintahan, karena kebutuhan masyarakat pada era reformasi birokrasi ini berkembang semakin dinamis sehingga diperlukan staf-staf pemerintahan yang terampil dan cakap. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintahnya dapat juga berdampak positif pada perekonomian bangsa, di mana negara yang memiliki tingkat Government Index yang tinggi biasanya memiliki prospek bisnis dan investasi yang baik, .

Manajemen ASN adalah cara manajemen untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki core value dan etika profesi, bebas dari pengaruh politik, bersih dari korupsi, konspirasi dan nepotisme. Beberapa aspek dalam manajemen ASN, sebagai berikut: rekrutmen, di mana kebutuhan pegawai didasarkan pada Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja, serta penggunaan Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi pegawai ASN; pengembangan pegawai, yang berupa hak seluruh pegawai ASN untuk berkembang dengan mengikuti diklat, seminar, kursus, praktik kerja, dan program pertukaran PNS-swasta; promosi yang berbasis kompetisi terbuka bagi setiap pegawai ASN yang memenuhi syarat; kesejahteraan yang berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, risiko pekerjaan, dan kinerja; manajemen kinerja yang menjamin objektivitas pembinaan pegawai ASN yang didasarkan prestasi dan sistem karier, serta adanya sanksi atas tidak tercapainya kinerja; disiplin dan etika yang berisi rincian kode etik profesi dan sanksi-sanksi; serta pensiun dengan sistem fully funded. Reformasi birokrasi pengelolaan sumber daya manusia ASN merupakan proses

yang berkesinambungan dengan memperhatikan capaian yang telah dicapai dan menelaah kesenjangan yang ditimbulkan oleh agenda pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, (Rudito *et al.*, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hendrayady *et al.* 2022. *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Ahmadin, Ahmadin, et al. *SOSIOLOGI RUANG VIRTUAL*. Edited by Ahmadin, Ahmadin, CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023.
- Amane, A. P. O. 2019. EFEKTIFITAS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGKOORDINASIAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA BALOHANG KECAMATAN LEDE KABUPATEN PULAU TALIABU. *Jurnal Clean Government*, 1(2), 31-44.
- Amane, A. P. O. 2019. PERANAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV TAHUN 2017 DI KABUPATEN BANGGAI. *Jurnal Clean Government*, 2(1), 132-144.
- Bambang Triyono *et al.* 2013. *Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi*. DIREKTORAT EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SEKTORAL KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS).
- Fajrillah *et al.* 2022. *E-GOVERNMENT*. Pertama. Edited by D. Gustian. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Guampe, Feliks A., et al. *PEMBANGUNAN PEDESAAN (PRINSIP, KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN)*. Edited by Damayanti, Evi, CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
- Hasan, M. *et al.* 2023. *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Media Sains Indonesia.

- Hatta, H., Umiyati, H., Amane, A. P. O., Santosa, S., Novianti, R., Liniarti, S., ... & Ahdiyat, M. 2023. *MODEL-MODEL PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM*. Penerbit Widina.
- Makelo, A. P. D., & Amane, A. P. O. 2019. PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BUKU ADMINISTRASI UMUM DI DESA BALOMBONG. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Maniagasi, G. 2016. *Memahami Perilaku Birokrasi Pelayanan Publik*. Jayapura: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Jayapura.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand tentang Design Reformasi Blirokrasi 2010-2025* 2010.
- Ramadhanti, R. 2018. 'Politik dan Birokrasi Pemerintahan', *Jurnal Trias Politika*, 2(1), p. 96. doi: 10.33373/jtp.v2i1.1242.
- Rudito, B. *et al.* 2016. *Aparatur Sipil Negara*. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, I., Sururama, R. and Nurdin, I. 2022. 'Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi', *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), pp. 12–25. doi: 10.33701/jtpm.v2i1.2380.
- Susanto, E. H. 2017. 'Kelambanan Reformasi Birokrasi dan Pola Komunikasi Lembaga Pemerintah', *Jurnal ASPIKOM*, 1(1), p. 109. doi: 10.24329/aspikom.v1i1.11.
- Umiyati, Hesti, et al. *TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK*. Edited by Masruroh, Aas, CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023.
- Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. 2014.

Warsono, H. 2020. 'Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19', *DIALOGUE JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(1), pp. 1-18. doi: 10.14710/dialogue.v2i1.8182.

BAB 6

BIROKRASI DAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh Neng Suryanti Nengsih

6.1 Pendahuluan

Pada dewasa ini, Birokrasi Pemerintah merupakan warisan dari masa pemerintahan sebelumnya. Warisan tersebut berasal dari masa Pemerintah Orde Baru yang melaksanakan Pembangunan Nasional pada awal tahun 1970-an, dengan perkembangan birokrasi pemerintahan secara struktur dan jumlah pegawai yang semakin besar. Adapun semakin meluasnya peranan yang dijalankan yang terlihat berupa besarnya kontribusi dalam setiap pembuatan dan pengimplementasian berbagai kebijakan, penggerakan mesin atau alat administrasi pemerintahan, serta pengendali dan penyelenggara akan program pembangunan yang dilakukan yaitu dengan memposisikan diri sebagai suatu agen perubahan (*agent of change*). Pada umumnya, orientasi birokrasi dianggap sama atau identik dengan politik Pemerintah, namun pada kenyataannya tindakan birokrasi tersebut tidak sama sekali bebas nilai, dengan demikian sisi profesionalisme di bidang administrasi kerap kali sulit untuk dibedakan baik antara nuansa politik pemerintah dengan nuansa yang hanya semata-mata suatu teknis administrasi. Sejak era reformasi bergulir, reformasi birokrasi pemerintahan sudah direncanakan, akan tetapi kerap kali berhadapan dengan kendala dan hambatan dalam kenyataannya yaitu seperti adanya perubahan perilaku birokrasi yang tidak menjadi lebih baik, semakin maraknya

birokrat yang melakukan korupsi, pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat yang belum menunjukkan kinerja optimal, berbagai program pencapaian reformasi birokrasi telah disediakan namun dalam pelaksanaannya masih banyak Pemerintah Daerah yang belum terwujud dengan baik. Sama halnya seperti masalah kinerja yang masih belum baik pada kenyataannya sementara indikator kinerja telah tersedia, untuk itu pentingnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah serta strategi reformasi birokrasi yang berisi langkah-langkah pembenahan birokrasi.

Dalam menghadapi era globalisasi ini, reformasi birokrasi pemerintahan termasuk Pemerintahan Daerah di dalamnya sangat diperlukan sebagai landasan dalam melakukan pembenahan baik struktur dan kultur yang termasuk dalam kultur birokrasi dalam pemerintahan daerah. Harapan dari penyelenggaraan reformasi birokrasi ini yaitu guna menetapkan arah serta dasar dari suatu kebijakan dalam proses penyusunan berbagai program di Pemerintahan Daerah.

6.2 Makna Birokrasi

Dalam bahasa Inggris, birokrasi yaitu *bureaucracy*, yang berasal dari kata *bureau* (yang memiliki arti meja) dan dari kata *cratin* (yang memiliki arti kekuasaan), yaitu merupakan sebuah kekuasaan yang berada atau dimiliki oleh orang-orang di belakang meja. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), birokrasi dimaksudkan sebagai suatu alat untuk mengorganisasikan suatu pekerjaan secara teratur atau sistematis yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian, birokrasi memiliki tujuan yaitu agar suatu pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi. Bahwa bagaimana suatu pekerjaan yang jumlahnya banyak harus dapat diselesaikan dengan orang yang banyak pula

dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih dalam menyelesaikannya, dimana hal tersebut merupakan tugas dari birokrasi.

Menurut Blau dan Page (1956), birokrasi merupakan salah satu tipe dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dan dilakukan dengan cara mengoordinasikan secara teratur atau sistematis berbagai pekerjaan dari banyak orang tersebut. Sehingga, menurut Blau dan Page, birokrasi pada kenyataannya untuk melaksanakan keseluruhan prinsip organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kerap kali dalam pelaksanaannya, birokratisasi mengakibatkan adanya ketidakefisienan administratif.

Dengan mengutip pendapat Mouzelis, Ismani (2001) menegaskan bahwa dalam sebuah birokrasi terdapat beberapa aturan yang rasional, juga terdapat struktur organisasi serta proses yang berdasarkan pada pengetahuan teknis dan dengan tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Dari perspektif demikian, tidak ada sedikit pun alasan untuk memandang birokrasi itu jelek dan tidak efisien.

Adapun dengan mengutip pendapat Fritz Morstein Marx, Bintoro Tjokroamidjojo (1984) menjelaskan bahwa birokrasi diibaratkan sebagai salah satu tipe organisasi yang kemudian dipergunakan oleh pemerintahan modern dalam melakukan berbagai macam tugas atau urusan yang memiliki sifat khusus (spesialisasi), yang kemudian dilaksanakan dalam sistem administrasi yaitu oleh para aparatur pemerintahan.

Dengan mengutip pemikiran Blau dan Meyer, Dwijowijoto (2004) menjelaskan bahwa birokrasi merupakan sebuah lembaga yang sangat kuat yang berkemampuan untuk meningkatkan berbagai kapasitas potensial pada hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk yang dalam keberadaannya

dianggap sebagai suatu instrumen yang diperlukan pada administrasi rasional yang bersifat netral dalam skala besar. Adapun dijelaskan bahwa di dalam suatu masyarakat modern, terdapat banyak sekali tugas atau urusan yang kerap dilakukan secara berulang kali atau secara terus-menerus dan ajeg, sehingga hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya dengan tepat. Birokrasi dalam praktik dijabarkan sebagai aparatur negeri sipil.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan suatu prosedur yang efektif dan efisien, yang selanjutnya dengan berlandaskan atau didasari oleh sebuah teori dan aturan yang berlaku serta mempunyai spesialisasi yang sesuai tujuan yang telah disepakati baik dalam sebuah organisasi atau instansi dan lembaga pemerintah. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa birokrasi adalah suatu hal yang dimaksudkan atau dianggap sebagai sebuah kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja karena segala sesuatunya diatur secara legal serta formal oleh para birokrat. Adapun harapan dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut yaitu berupa dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas pelaksanaan kekuasaan tersebut karena setiap jabatan diurus oleh orang (petugas) yang khusus sejak periode setelah masa kolonial sampai dengan sekarang.

6.3 Birokrasi Indonesia Zaman Kolonial Hingga Sekarang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang tergolong sebagai negara yang sedang berkembang. Masyarakat Indonesia sedang mengalami peralihan atau transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern (maju). Bagi Indonesia yang sudah terlalu lama mengalami penjajahan oleh negara asing, kondisi peralihan

tersebut sangat memberikan pengaruh dalam birokrasi pemerintahan. Adanya perspektif tersebut dapat dilihat dalam seleksi penerimaan pegawai, kenaikan pangkat, sampai dengan pelaksanaan tugas di mana yang diutamakan yang merupakan tingginya loyalitas individu kepada pimpinan serta harus sesuai dan selaras dengan pimpinan, bukan seperti bagaimana kepentingan masyarakat diutamakan, dengan demikian *the right man on the right place* (orang yang tepat dalam posisi yang tepat) tidak pernah dapat tercapai. Adanya kerajaan dahulu, memberikan pengaruh yaitu bahwa aparatur negara ataupun pejabat negara dianggap sebagai seorang priyayi, serta terdapat budaya sungkan terhadap atasan atau pimpinan walaupun atasan atau pimpinan tersebut melakukan penyimpangan.

Negara berkembang seperti salah satunya Indonesia yang termasuk dalam kategori masyarakat transisional. Menurut Fred W. Riggs dalam Pamudji, masyarakat transisional disebut juga sebagai model masyarakat Prismatik (*Prismatic Society*), yaitu sebuah masyarakat dengan memiliki ciri-ciri tradisional atau agraria yang bersamaan dengan ciri-ciri modern atau industri, serta di dalam masyarakat prismatik (*prismatic society*) terdapat sub model yang disebut sebagai sala. Adapun sifat atau ciri-ciri masyarakat prismatik yaitu berupa yang pertama yaitu adanya heterogenitas yang tinggi, yang kedua yaitu formalisme yang tinggi, serta yang ketiga yaitu *overlapping* (Pamudji, S, 1986: 57-59).

Yang menjadi ciri pertama yaitu tingginya tingkat heterogenitas yang merupakan suatu campuran yang timbul dari berbagai sifat atau ciri-ciri masyarakat tradisional (*fused society*). *Fused society* memiliki makna bahwa menunjukkan adanya suatu fungsi (ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya) serta adanya diferensiasi lembaga yang menyatu dalam satu lembaga, masyarakat ini tersusun berdasarkan adanya

hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang memegang berbagai macam fungsi, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pembantu kepala suku. *Refracted society* merupakan lawan dari *fused society* yaitu *Refracted Society* bermakna bahwa dalam suatu masyarakat sudah berlangsung suatu spesialisasi fungsi serta adanya diferensiasi lembaga pemerintahan, dimana setiap lembaga pemerintahan memegang fungsi khusus tertentu yang berkembang dalam masyarakat. Pada ciri pertama ini fungsi administratif dilaksanakan berdasarkan atas hubungan kekeluargaan secara sembunyi-sembunyi, sementara itu disusun juga sebuah struktur jabatan kantor yang baru serta seperangkat norma untuk dipatuhi guna menggantikan organisasi berdasarkan atas kekeluargaan atau kekerabatan.

Walaupun dengan adanya norma-norma tersebut yang diabaikan, berdasarkan atas norma yang bersifat universalistik itu jabatan dalam administrasi negara diisi oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan satu sama lain, hal di atas merupakan salah satu ciri yang tampak dalam pengadaan pegawai dari sub model sala. Kemudian ciri kedua dari masyarakat prismatic yaitu berupa tingkat formalisme yang tinggi yang memiliki ciri-ciri bahwa adanya tingkat ketidaksesuaian (*discrepancy*) atau tingkat kongruensi (*congruence*) antara sesuatu yang telah dituliskan secara formal dengan sesuatu yang dipraktikkan secara nyata antara norma dengan kenyataan. Dengan membesarnya tingkat kongruensi suatu keadaan akan menjadi semakin lebih realistis, sedangkan dengan membesarnya tingkat ketidaksesuaian maka keadaan akan menjadi semakin lebih formalistis.

Selanjutnya yang termasuk ciri ketiga yaitu adalah terdapat *overlapping*, yang bermakna bahwa berbagai struktur yang sudah didiferensiasikan dan dispesialisasikan secara

formal akan berjalan selaras dengan berbagai struktur yang belum didiferensiasikan maupun dispesialisasikan. Di dalam ciri ketiga, keluarga dan kantor memiliki pengaruh dalam mengatasi penyelenggaraan fungsi dinas atau kantor yang sedemikian rupa sehingga peraturan yang berlaku dilaksanakan secara sewenang-wenang terhadap keluarga, sebaliknya dilaksanakan secara sekeras-kerasnya terhadap pihak yang bukan keluarganya, dengan kata lain kepentingan keluarga lebih tinggi daripada kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah, bahkan kepentingan negara. Pengelompokan yang dilakukan berdasarkan atas kekeluargaan tersebut menimbulkan solidaritas kelompok dengan berlandaskan atas ras, etnis, agama, partai, dan lain-lain. Hal tersebut memiliki dampak terhadap administrasi publik yaitu berupa dalam praktik administrasi publik ditemukan adanya diskriminasi yang menguntungkan kelompoknya atau kelompok tertentu yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dan merugikan kelompok atau pihak lain. Diskriminasi ini kemudian menyebar hingga ke pengadaan pegawai, yang kemudian dikaitkan dengan adanya nepotisme, model praktik dalam sala ini selalu mengutamakan anggota kelompok yang dominan. Adapun alternatif lain yang biasanya digunakan yaitu dengan menerapkan sistem penjatahan (quota) di antara berbagai kelompok yang ada, sehingga dalam satu organisasi administratif itu dipimpin atau dijalankan oleh beberapa kelompok, dan jika kemungkinan berada dalam keadaan yang ekstrem mampu menyebabkan tidak adanya semangat kerja sama antara anggota kelompok satu sama lain serta saling bersaing satu sama lain, yang kemudian mengakibatkan tidak efisiennya administrasi publik.

6.4 Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Reformasi birokrasi pemerintahan memiliki makna sebagai suatu perubahan besar dalam suatu paradigma tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mengarah pada organisasi (kelembagaan) tata laksana, sumber daya manusia (SDM), pelayanan, serta akuntabilitas. Menurut Samin, reformasi merupakan sebuah gerakan yang berusaha mengubah perilaku dan bentuk dari suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan zaman baik karena tidak bersih, tidak efisien serta tidak demokratis.

Birokrasi pemerintahan adalah suatu unsur yang sangat vital dalam penentuan arah dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan negara. Adapun pendapat Thoha, birokrasi merupakan suatu pemerintahan atau pengelolaan masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, tertulis, terdokumentasi secara rapi serta dilakukan oleh orang yang beradab dan terdidik. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat serta semakin ketatnya persaingan global, masyarakat semakin peka terhadap kinerja birokrasi pemerintahan serta menaruh kepedulian terhadap peningkatan kualitas hidupnya. Perlu diketahui bahwa baik buruknya kinerja birokrasi pemerintahan akan sangat menentukan pada rendah atau tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Asropi persoalan utama reformasi birokrasi merupakan masalah SDM berupa komitmen pimpinan, kualitas dan moralitas SDM, sistem yang dianggap sebagai faktor penentu kinerja reformasi birokrasi pemerintahan daerah belum memuaskan.

Reformasi birokrasi pemerintah menjadi salah satu bagian dan upaya untuk meningkatkan kekuatan negara. Karena dengan melalui reformasi birokrasi pemerintah ini, peran pemerintahan didefinisikan ulang guna menjawab

tantangan, karena reformasi birokrasi tidak sekedar hanya melakukan penyederhanaan struktur birokrasi, akan tetapi juga mengubah pola pikir (*mindset*) dan pola budaya (*culture set*) birokrasi untuk berbagai peran dalam tata kelola pemerintahan. Kemudian Asropi menyatakan bahwa budaya memiliki pengaruh yang besar dan sangat penting terhadap kinerja reformasi birokrasi pemerintah di daerah.

Ketidakpekaan aparat serta hati nurani yang lemah dalam memberikan pelayanan menyebabkan adanya perbedaan terhadap para pemohon. Dapat dilihat secara jelas, bahwa aparat belum dapat memberikan perlakuan serta penghargaan yang layak kepada para pemohon sebagai seorang individu yang harus di hormati haknya. Perbedaan kemampuan aparat dalam berinteraksi dengan pemohon dipengaruhi oleh faktor balas jasa dan faktor saling pengertian. Dengan demikian, bagi pemohon yang diperkirakan tidak memberikan kontribusi terhadap aparat, kemungkinan akan sulit bagi pemohon untuk mendekati aparat secara pribadi sehingga urusannya dapat berjalan lancar. Sebaliknya bagi pemohon yang sudah biasa mengurus (*calo*) dan memberikan kontribusi pastinya akan lebih mudah dalam mengakses layanan yang dilakukan melalui pendekatan pribadi terhadap aparat pemerintah yang berkaitan langsung dengan proses layanan. Serta pada aspek ketatalaksanaan Pemerintah Daerah masih terdapat dinas yang minim akan SOP, serta banyak masyarakat merasa berurusan dengan pemerintah tersebut membutuhkan proses yang panjang dan pelayanan yang lama.

6.5 Strategi Reformasi Birokrasi Pada Pemerintahan Daerah

Strategi reformasi birokrasi pada pemerintahan daerah merupakan salah satu upaya atau cara untuk memperkuat daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya serta

untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka menjalankan konsep desentralisasi sesuai dengan otonomi daerah. Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom, yaitu dimana daerah yang berhak, berwenang mengurus sendiri urusan rumah tangganya, yang kepadanya diberikan urusan pemerintahan sebagai upaya untuk mengelola sumber-sumber keuangan, penyediaan pelayanan publik, serta pembangunan daerah yang berdasarkan atas asas efisiensi dan asas efektivitas. Kemudian daerah harus dapat menggali sumber daya yang dimiliki yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya pelayanan, peningkatan daya saing daerah berdasarkan potensi dan kekhasan serta keunggulan daerah yang dikelola secara akuntabel dan demokratis.

Untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, Pemerintah Daerah harus dapat segera melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan atas asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam mewujudkan *good governance* diperlukan konsistensi dan komitmen dari semua pihak yang terlibat seperti aparatur pemerintah, masyarakat serta pihak swasta. Dalam pelaksanaannya tersebut menuntut adanya koordinasi yang baik dari berbagai pihak yang terlibat, tingginya sifat profesionalisme serta tingginya etos kerja dan moral. Di dalam strategi reformasi birokrasi, diperlukan adanya perubahan perilaku yang selaras dengan dimensi-dimensi etika pemerintahan, penegak hukum yang efektif serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan demokratis.

6.6 Cara Birokrasi Bekerja

Melansir dari investopedia.com, sebuah konsep seperti "birokrat" dan "birokrasi" kerap kali berkonotasi negatif. Birokrat menyiratkan maksud yaitu sebagai personil atau pegawai pemerintah, sedangkan istilah birokrasi menyiratkan maksud bahwa pentingnya metode yang ditetapkan daripada efisiensi. Akan tetapi, ada cara atau metode yang lebih seimbang dalam melihat birokrasi. Proses birokrasi cocok untuk di kritik. Sistem birokrasi ini sering diidentikkan dengan kesewenang-wenangan, redundansi, serta inefisiensi. Adapun definisi satir yang umum mengenai birokrasi yaitu merupakan "seni dalam membuat hal yang mungkin menjadi hal yang tidak mungkin".

Secara struktural, birokrasi berawal dari suatu upaya untuk mengatur dan mengkoordinasikan organisasi melalui sistem tertutup. Sistem tertutup ini bersifat formal dan kaku guna menjaga ketertiban. Ketepatan prosedural merupakan hal terpenting dalam birokrasi. Kemungkinan hanya terdapat satu identifikasi karakteristik birokrasi yang paling dekat yaitu adalah penggunaan prosedur yang hierarkis guna menyederhanakan atau menggantikan keputusan otonom.

6.7 Tujuan Birokrasi

Mengutip dari pelayananpublik.id, birokrasi bertujuan guna melaksanakan administrasi publik, pelayanan publik serta kerja sama antar berbagai lembaga pemerintah maupun negara. Adapun beberapa tujuan dari birokrasi yaitu antara lain:

1. Menjalankan kegiatan atau program untuk mencapai visi dan misi pemerintahan
2. Mengaplikasikan keseluruhan aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan sebagainya.

3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan secara netral dan profesional.
4. Memberi kemudahan terhadap masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan.
5. Mendukung, mempercepat, mempermudah, meningkatkan efisiensi serta efektivitas pencapaian dari berbagai tujuan pemerintah.
6. Memberi jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan suatu negara.

6.8 Fungsi Birokrasi

Menurut Andrew Heywood terdapat empat fungsi dari birokrasi, yaitu antara lain:

1. Sebagai Pelaksanaan Administrasi. Adapun fungsi utamanya yaitu mengimplementasikan atau mengeksekusi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara.
2. Sebagai Artikulasi Kepentingan. Pada kenyataannya, birokrasi banyak melakukan kontak dengan berbagai kelompok berkepentingan dalam suatu negara.
3. Sebagai Nasehat Kebijakan (*Policy Advice*). Birokrasi memiliki berperan penting dalam pemberian nasehat kebijakan kepada pemerintah suatu negara. Hal tersebut karena birokrasi merupakan lini terdepan dalam pengimplementasian suatu kebijakan.
4. Stabilitas Politik. Dengan memiliki fokus kerja berupa tujuan untuk menciptakan stabilitas dan kontinuitas suatu sistem politik.

6.9 Kendala Dalam Peran Birokrasi Dalam Pemerintahan

Walaupun birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintah daerah, birokrasi juga kerap kali mengalami kendala atau hambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun kendala yang kerap dihadapi oleh birokrasi dalam pemerintah daerah yaitu antara lain :

1. Adanya Biaya dan Waktu yang Terbatas

Birokrasi seringkali menghadapi keterbatasan biaya dan waktu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini menjadikan birokrasi sulit dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan cepat kepada masyarakat.

2. Terkait dengan Sistem Pemilihan Pegawai

Sistem pemilihan pegawai di birokrasi pemerintah seringkali mengacu pada koneksi dan dukungan politik, bukan pada suatu kompetensi dan keterampilan yang dimiliki. Hal ini menjadikan birokrasi sulit dalam merekrut pegawai yang berkualitas dan profesional.

3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Birokrasi seringkali kurang transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini menjadikan birokrasi sulit untuk mendapat kepercayaan masyarakat, serta menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja birokrasi pemerintah.

Pada umumnya, organisasi pemerintahan dikatakan sebagai sebuah birokrasi, sedangkan yang memegang peranan dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atau yang berperan sebagai penyelenggara birokrasi adalah para birokrat. Sehingga para pejabat birokrasi atau para birokrat harus mampu berpikir secara rasional, sistematis, dan kompleks dalam melaksanakan berbagai macam fungsi dan tugas negara. Latar belakang pendidikan akademis juga

merupakan salah satu persyaratan dasar dan utama dalam pengadaan pegawai dan penempatan personil, terutama untuk jabatan-jabatan yang harus melakukan planning, perkiraan, kalkulasi, policy formulation, serta pengambilan keputusan (*decision making*). Namun adapun hal penting lainnya yaitu adalah syarat-syarat akan kepribadian seorang individu, karena para birokrat tersebut harus banyak berhubungan atau berkomunikasi dengan warga masyarakat, yang berarti bahwa di samping terampil dan berkeahlian dalam bidang tugasnya, para birokrat juga harus pandai dalam “merakyat” dan melayani masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa pamrih.

Sudut pandang yang mengemukakan bahwa birokrasi merupakan sesuatu hal yang kemudian dapat mencerminkan akan adanya kekuasaan para birokrat, yang sulit untuk ditembus oleh lapisan masyarakat yang berada pada posisi lemah di hadapan kekuasaan para birokrat. Sudut pandang yang sakral tersebut pada kenyataannya perlu dilakukan perubahan, karena pada umumnya birokrasi hanyalah sebuah “alat” atau mesin yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Selain mengacu pada aturan legalistik, birokrat sebagai penyelenggara birokrasi juga memiliki orientasi yang dinamis dalam melaksanakan aturan legalistik tersebut. Seorang birokrat merespon dengan cepat tanggap dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat saat ini memberikan berbagai macam tuntutan yang memerlukan jawaban. Jika jawabannya yang diberikan tidak sesuai dengan tuntutan yang diberikan maka akan memberikan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga seorang birokrat harus mampu menjawab tuntutan masyarakat tersebut sesuai dan selaras dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Birokrasi pemerintahan tentunya harus selalu mengarah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kekuasaan yang berada pada tangan birokrat harus beralih lokusnya kepada masyarakat, karena segala hal yang menjadi dan dibuat suatu kebijakan oleh para birokrat tersebut bersumber dari pemikiran, aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan masyarakat, serta para birokrat sadar dalam harus bertindak dan bersikap menggunakan wibawa dan kekuasaan negara, dan sebagai pelayan masyarakat seorang birokrat tidak boleh menunjukkan sikap hanya memainkan kekuasaan saja (Sinambela, 2010: 69)

6.10 Kesimpulan

Birokrasi memiliki peranan penting dalam pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan birokrasi mampu memberikan dukungan baik administratif maupun teknis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Namun, sering kali birokrasi berhadapan dengan kendala dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seperti keterbatasan biaya dan waktu, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya guna mengatasi kendala yang dihadapi tersebut sehingga birokrasi dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin. 2005. Birokrasi. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan Kepercayaan publik Melalui Reformasi Birokrasi. Gramedia Pustaka Utama
- Azhari. 2011. Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia : Studi perbandingan intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi Di Indonesia dan Malaysia. Yogyakarta :Pustaka pelajar
- Azhari, A. Kholik. 1994. Birokrasi dan Tuntutan Demokratisasi, Makalah Seminar. AIPI XI.
- D. F. Cahyanto, "Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Birokrasi dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah," Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, vol. 5, no. 1, pp. 32-44, Jun 2019.
- Dahniar, Ati. 2016. Dinamika Birokrasi dan Pelayanan Publik, (Pengayaan Materi Administrasi Perkantoran Modern dalam Diklat Perkantoran dan PIM IV).
- Dahniar, Ati, Good Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel, <http://bdkjakarta.kemenag.go.id>, 2016, 9 Februari 2018 pukul 11.02.
- Dwiyanto, Agus 2015. Reformasi Birokrasi Kontekstual. Gajah Mada University Press : Anggota IKAPI
- H. M. Hasan, "Meningkatkan Kinerja Birokrasi Melalui Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia," Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, vol. 2, no. 2, pp. 67-78, Des 2018.
- Hariyanto Usia. 2012. Governance, Sejarah, Otokritik, dan Implementasinya di Indonesia, <http://hariyantousia.blogspot.co.id/2012/12/konsep-good-governance.html>, (diakses 12Januari2018).

- Nurbarani, Myrna. 2009. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta, Semarang: Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sigit Setiawan. 2014. Tinjauan Reformasi Birokrasi, Evolusi Model Birokrasi dalam Perspektif Ekonomi dan Perkembangan Reformasi Birokrasi di Indonesia, Peneliti Madya pada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral-BKF.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/MAD/article/view/27>
- 13
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi>

BAB 7

KEWIRAUSAHAAN BIROKRASI

Oleh Amtai Alasan

7.1 Pendahuluan

Birokrasi di Indonesia mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang sangat dominan dalam perpolitikan nasional mulai nampak sejak dikeluarkannya maklumat 3 Nopember 1945. Positioning ini membuat perjalanan pemerintahan orde lama sampai dengan saat ini menjadikan birokrasi sebagai alat kepentingan politik untuk mendapatkan kekuasaan ketimbang memperhatikan aspek sosial-budaya masyarakat. Tak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya tarik menarik kepentingan politik ini membuat sehingga fungsi pelayanan birokrasi publik lebih banyak berorientasi pada kekuatan politik semata. Hal yang samapun terjadi pada masa pemerintahan orde baru, dimana birokrasi masih terpola dengan kondisi yang suka mengatur dengan dalil kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, namun perbedaan yang tampak jelas terletak pada faktor pemicunya yaitu jika dahulunya politik sebagai motor penggerak maka saat orde baru *triggernya* adalah pembangunan *security aprouch*. Kondisi ini lebih diarahkan pada kondisi politik, ekonomi serta keamanan, dengan maksud untuk menjaga kestabilan pembangunan yang berada pada satu patron komando.

Dimasa itu, peran pemerintah kembali menjadi begitu sentral karena semua sumber daya dan keuangan yang ada dimobilisasikan untuk meningkatkan pebangunan yang dikomandokan langsung oleh pemerintah. Tugas pembangunan itu hanya dapat dikerjakan oleh pemerintah/Negara melalui

berbagai kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan oleh birokrasi. Kondisi ini membuat birokrasi selalu memiliki peran yang sangat kuat, pendekatan kekuasaan lebih diutamakan dari pada memberikan pelayanan publik dengan sistem dan mekanisme kerja yang cenderung bersifat *top-down* ketimbang *bottom-up*. Dari sini maka masyarakat akan semakin di atur dan pilihannya akan ditentukan oleh pemerintah sehingga kemitraan yang terbagun antara pemerintah dan masyarakat lebih bersifat berat sebelah atau tidak seimbang. Publik akan selalu memiliki anggapan bahwa kekuasaan birokrasi sangat besar dan mendominasi kehidupan bernegara walau kinerjanya terbilang lambat.

Konsep mewirusahaakan birokrasi merupakan wacana untuk melakukan reformasi birokrasi dengan menanamkan nilai-nilai kewirausahaan dalam mekanisme kerja birokrasi (*entrepreneur-ship government*) yang pertama kali dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dalam bukunya: *Reinventing Government*. Wacana yang mengemuka saat itu adalah merubah paradigma birokrasi publik dengan menanamkan system kerja, semangat dan nilai-nilai kewirausahaan (*entrepreneur-ship spirit*) dalam birokrasi. Mewirusahaakan birokrasi merupakan suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap cara berpikir dan bertindak untuk dapat menubuhkan wirausaha pada birokrasi sehingga pemerintah tidak hanya menggakap anggaran pendapat negara hanya bersumber dari pajak namun jiwa wirausaha hendaklah digunakan untuk mewujudkan kebijakan pemerintah yang pada saatnya dapat membantu memperkuat sektor publik.

Kemandirian pemerintah dalam upaya untuk menghasilkan dari pada menghabiskan itu harus menjadi perhatian yang serius, terutama pada anggaran yang harus didukung oleh aparaturnya pemerintah yang memiliki jiwa wirausaha untuk dapat melakukan kreasi dan inovasi agar

dapat menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk itu sangat baik apabila pemerintah menggunakan sepuluh prinsip *reinventing government* yang telah dikemukakan oleh Osborne dan Gebler untuk mememberdayakan aparatur pemerintah. Dengan adanya sepuluh prinsip tersebut maka diharapkan pemerintah dapat:

1. Mewujudkan pemerintahan yang katalis yang lebih mengarahkan bukan memerintah, Responsif terhadap kebutuhan masyarakat agar dapat menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
2. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan pemerintahan (*empowerment*)
3. Mengusahakan untuk menanamkan iklim persaingan yang sehat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Menanamkan system kerja yang lebih berorientasi pada misi dan bukan pada tugas yang diemban. Hal ini akan memungkinkan meningkatkan keratifitas dan inovasi kerja untuk mencapai misi
5. Meningkatkan kualitas kinerja (orientasi hasil) yang baik agar dapat memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat.
6. Memiliki jiwa yang tangguh dan patang menyerah sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pada pemerintahan
7. Menjadi birokrasi yang visioner, dan berorientasi pada capain tujuan organisasi dengan orientasi mendapatkan bukan membelanjakan
8. Memiliki komitmen untuk melakukan pencegahan dari pada mengobati dengan bersikap Jujur, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
9. Selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan membangun hubungan kemitraan yang partisipatif

10. Memiliki orientasi pasar dan melaksanakan proses pemerintahan.

7.2 Konsep Kewirausahaan Birokrasi

Konsep kewirausahaan birokrasi peratama kali hadir dan diungkapkan oleh David Osborne dan Ted Gabler dalam buku yang berjudul "*Reinventing Government*" dalam buku tersebut berisi tentang suatu saran untuk membantu memecahkan solusi kepada Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993 yang menanggung beban berat dengan akibat banyak yang menjadi tanggung untuk kebutuhan negara oleh pemerintah faderal (Wirnarno 2004: 4)

Permasalahan yang terus bermunculan dalam memahami mewirausahakan birokrasi adalah suatu anggapan bahwa dengan adanya konsep kewirausahaan birokrasi berarti kantor dinas/instansi pada pemerintahan daerah harus di tuntut untuk dapat memberikan tambahan pendapatan anggaran daerah, dengan arti bahwa pemerintah harus dapat memeberdayakan institusional. Menurut Osborne dan Gaebler mewirausahakan birokrasi berarti mentranformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik dengan masuk dari pendabat para ahli ini adalah pemahaman terhadap cara-cara mewirausahakan birokrasi dapat diterapkan dan dikuasai oleh para birokrasi. (Gaebler 2008: 3)

Konsep mewirausahakan birokrasi pada dasarnya representasi dari paradigama *New Public Management* di mana negara dipandang sebagai suatu perusahaan jasa yang moderen yang terkadang harus bersaing dengan pihak swasta, tetapi pada pihak lain dalam bidang-bidang lain tentu memeiliki kekuasaan/monopoli layanan jasa, namun tetap dengan berkewajiban memberikan layanan yang berkualitas dan maksimal. Selaian itu juga adanya kewirausahaan birokrasi maka pemerintah akan menggunakan cara wirausaha untuk

dapat menjadi lebih efisien dan efektif untuk menghindari kebangkrutan suatu birokrasi. Birokrasi publik yang hanya berjalan berdasarkan pada peraturan tidak dapat mencapai efisien dan efektif karena akan terhambat karena kinerja yang terkesan lambat, tetapi jika birokrasi yang digerakan berdasarkan misi dan tujuan dasar akan lebih efektif dan efisien.

Dalam proses inventarisasi dan reduksi pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Perbaiki manajemen pemerintahan dari gaya birokratis ke gaya *entrepreneur* yang pada umumnya diterapkan dalam sektor bisnis. Pemahaman ini merubah pendekatan manajemen pelayanan publik yang sebelumnya menggunakan pendekatan birokratis. Teknik-teknik manajemen yang dapat digunakan pada sektor bisnis dapat diterapkan pada sektor pemerintahan seperti pada penyusunan renstra dan ukuran kinerja untuk pemerintah lokal seperti BUMN yang ada pada akuntabilitas kinerja pemerintah. Unsur-unsur yang terdapat pada sektor pemerintahan seperti departemen, BUMN, dan BUMD.
2. Mentranfer fungsi – fungsi pelayanan publik ke sektor non-pemerintahan, seperti menggunakan manajemen kontrak, privatisasi dan membuka alternatif alternatif pelayanan sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan.

7.3 Prinsip-Prinsip Mewirauahakan Birokrasi

Pada dasarnya untuk ada perubahan pada pemerintah, maka pemerintah harus memiliki peran yang mana peran tardisonel yang memeiliki sifat mengatur dan menguasai, sehingga pemerinta perlu memiliki beberapa peran dalam meweirauahakan birokrasi:

1. Pemeritahan Katalis

Untuk dapat mewriusahakan birokrasi pemerintah harus lebih mengutamakan kegiatan yang memiliki sifat mengarahkan dari pada mengatur, karena pemerintah semestinya memiliki sifat mengarahkan dengan melakukan perencanaan yang matang sehingga hubungan yang terbangun merupakan kemitraan yang strategis ddengan swasta khususnya yang lebih mengarah pada kegiatan yang bersifat pelayanan.

2. Pemeritahan Milik Masyarakat

Pemerintah harus menempatkan diri sebagai abdi yang dimiliki oleh masyarakat dengan selalu mengutamakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bukan sebaliknya untuk dilayani. Hal ini dilakukan dengan maksud pemerintah memeberikan kewenangan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi meningkatkan kemandirian masyarakat.

3. Pemeritahan Yang Kompetitif

Perlunya pemerintahan yang kompetitif, dengan menanamkan system kerja yang mengharuskan adanya persaingan yang sehat dalam memberikan pelayanan. Dengan system kompetitif yang sehat ini akan memebrikan keuntungan yang efisen besar, meningkatkan respon terhadap pelanggan dan mendorong inovasi sehingga membangkitkan semangat yang memberikan motivasi.

4. Pemerintahan Yang Di Gerakan Oleh Misi

Perlu adanya perubahan tata kerja pemerintahan yaitu merubah sistem pemerintahan yang terfokus pada aturan atau digerakan oleh peraturan yang cendrung kaku dan mengikat menuju pemerintahan yang digerakan oleh misi. Misi yang dapat dicapai harus digerakan oleh kebijakan

pemerintah karena organisasi yang berjalan sesuai misi akan memiliki keuntungan yang efisien efektif dan inovatif.

5. Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Hasil

Pemerintah menciptakan organisasi yang memiliki orientasi pada hasil, produktif dan mendapatkan bukan yang cenderung menghabiskan dan konsumtif. Dengan hasil yang baik maka harus dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian pelayanan, tingkat partisipasi serta kualitas lingkungannya.

6. Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Pelanggan

Pemerintah harus berorientasi pada pelanggan dengan terus berupaya memenuhi kebutuhan peanggang (masyarakat) bukan memenuhi kebutuhan birokrasi, karena pemerintah memiliki orientasi pada birokrasi maka akan ada sikap arogansi birokrasi yang lebih mengutamakan memenuhi kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

7. Pemeritahan Wirasusaha

Pemerintah wirausahaan merupakan pemerintahan yang seharusnya berusaha mengorientasikan untuk menghasilkan dari pada mengeluarkan pembiayaan. Dengan system dan semangat kerja wirausaha menjadikan birokrasi itu lebih produktif dalam menghasilkan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas

8. Pemeritahan Antisipatif

Pemeritah harus antisipatif dan betindak segera mungkin dalam memepersiapkan diri terhadap keadaan yang akan terjadi. Untuk itu pemerintah sudah menerapkan prinsip pencegahan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dari pada mengobati.

9. Pemeritahan Desentralisasi

Pemerintahan desentralisasi, beberpa pulu tahun yang lalu peerintahan yang tersentralisasi karena pada saat itu

teknologi informasi masih primitif, komunikasi yang dibangun di antara lokasi masih sangat lambat, sumber daya manusia, manun saat ini teknologi informasi telah berkembang pesat sehingga komunikasi anatara pusat dan daerah sudah terjalin dengan baik. Dengan adaya kemajuan informasi dan teknologi mka pemerintah wirausaha dapat menghendaki terjadinya desentralissi dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan yang terdesentralisasai memiliki keungglan yaitu :

- a. Lebih fleksibel karena memebrikan respon cepat terhadap perbahan lingkungan
- b. Lebih efektif karena pemerintah dapat mengetahui perkembangan dan dapat meciptakan solusi yang lebih baik.
- c. Lebih inovatif karena pemerintah lebih terbuka pemahaman terhadap gagasan dan ide dari pelakasanaan kegiatan di lapangan.
- d. Memebrikan motivasi kerja yang tinggi, komitmen yang tinggi sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi juga.

10. Pemeritahan Yang Berorientasi Pada Pasar

Pemrintah berorientasi pada pasar, dimana perubahan kebijakan yang dilakukan melalui mekanisme pasar, keunggulan dri manajemen ini adalah:

- a. Lebih kompetitif
- b. Mendorong minta pelanggan
- c. Memebrikan respon bagi perubahan yang terjadi.

7.4 Strategi Mewirausahakan Birokrasi

Menurut Osborne dan Plastrik (2000:15) dalam bukunya *Banishing Bureaucracy* dengan menjelaskan beberapa strategi yang harus diperhatikan agar dapat menuju pemerintahan wirausaha yaitu:

1. Strategi Inti

Strategi ini dapat dilaksanakan dengan tujuan dan fungsi pemerintahan yang jelas, maksudnya adalah strategi ini di fokuskan pada adanya kejelasan peran arah dan tujuan pemerintahan. Strategi ini digunakan untuk dapat menghapus dan membersihkan fungsi-sungsi pemerintah yang tidak sesuai dan sejalan dengan tujuan dari pemerintahan.

2. Strategi konsekuensi

Strategi ini digunakan untuk mengembangkan sistem insentif yang merupakan konsekuensi terhadap kinerja yang di hasilkan oleh seseorang atau organisasi, untuk strategi ini menggunakan pendekatan

- a. Persaingan yang harus bisa dikendalikan dengan penerapan mekanisme pasar sebagai dorongan kompetisi dan konsekuensi yang ditentukan oleh masyarakat. Alat ukur yang digunakan pada pendekatan ini adalah *tender kompetitif* dan *benchmarking kompetitif*.
- b. Pendekatan manajemen perusahaan sebagai konsekuensi dari mekanisme pasar yang sedang berlangsung. Alat yang digunakan oleh pendekatan ini adalah biaya penggunaan dan internal manajemen perusahaan.
- c. Pendekatan manajemen kinerja. Pendekatan ini cocok diterapkan dengan alasan yang rasional maupun gangguan politisi. Pendekatan ini menggunakan standar pengukuran tingkat kinerja dan imbalan serta penalti

untuk memberikan motivasi bagi organisasi pemerintahan. Alat yang digunakan adalah penghargaan terhadap kinerja, pembayaran psikologis, bonus dan hasil.

3. Strategi Pelanggan

Strategi ini lebih dipustakan pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap siapa yang organisasi pemerintah harus bertanggung jawab. Strategi ini lebih mengarahkan kepada pertanggungjawaban organisasi pemerintahan. Pendekatan yang digunakan dalam strategi ini adalah:

- a. Memebrih pilihan kepada pelanggan dengan melaksanakan sistem pilihan publik serta sistem informasi pelanggan
- b. Pilihan kompetisi yang mengkobinasikan strategi pelanggan dengan konsekkuensi serta memebrih kesempatan kepada pelanggan untuk mengontrol sumber daya
- c. Memastikan mutu pelanggan yang dilakukan dengan baik.

4. Strategi Penegndalian

Strategi ini menggunakan beberapa pendekatan juga yaitu:

- a. Pemberdayaan organisasi. Dengan menghapus banyak peraturan dan berbagai kontrol dan menerepakan strategi kontrol pada level organisasi alat yang digunakan adalah dsenterlisasi kontrol administratif dan deregulasi organisasi.
- b. Pendekatan pemberdayaan pegawai dengan menghapus fungsi kontrol manajemen yang hirarki dalam organisasi dan lebih mendorong kewenangan pada lini pertama. Alat yang digunakan yaitu

mengurangi lapisan manajemen desentralisasi organisasi.

5. Strategi Budaya

Pendekatan ini dilakukan untuk menciptakan kembali tatanan baru dengan menerapkan berbagai cara yang biasa dilakukan agar terciptanya sistem kerja baru dan pemahaman organisasi yang baru. Adanya pemahaman akan budaya dan sistem kerja yang baru ini mengharuskan tertanamnya nilai-nilai baru yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk untuk tetap meningkatkan kinerja birokrasinya. Sistem ini juga akan dapat memberikan keleluasan kepada pegawai untuk terlibat secara aktif dengan kreasi dan inovasi kerja yang dimilikinya tanpa dikontrol secara kaku oleh aturan, semangat aktualisasi diri akan semakin meningkat sesuai perilaku yang diinginkan, kecenderungan dan ketakutan terhadap tindakan yang terkontrol secara ketat oleh aturan semakin menurun karena adanya kebebasan yang dimiliki. Dengan semangat baru yang segar akan menghilangkan rasa takut sehingga upaya untuk mencapai keberhasilan dapat tercapai dengan cara menjalin komunikasi lintas sektoral dan membuat komitmen untuk mencapai tujuan jangka panjang yang mengarah pada tercapainya misi semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Niode Idris Yanto. 2014 *Entreprenuerial Government*. Gorontalo. UNG Press.
- Martini Rina. 2012. *Birokrasi dan Politik*. Semarang. UPT UNDIP Press Semarang.
- Muhammad. 2018. *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance)*. Lhokseumawe. UNIMAL PRESS
- Osborne David dan Plastrik. 2023. *Mewirauahakan Birokrasi. (Mentranformasikan Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik)*. Jakarta. PPM
- Osborne David dan Plastrik Peter. 2001. *Memangkas Birokrasi*. Jakarta. PPM
- Permatasari Ane. 2020. *Birokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta. Buku Litera
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik Di Indonesia*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Yudi Rusfina dan Cahya Supriatna. 2021. *Memahami Birokrasi Pemerintah dan Perkembangannya*. Bandung. Alfabeta

BAB 8

TANTANGAN MASA DEPAN

BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK

Oleh Sunariyanto

Perbedaan pendapat dalam memberikan makna kepada organisasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan. Makna-makna itu antara lain :

1. Makna Positif

Yaitu organisasi birokrasi dikatakan sebagai organisasi legal-rasional yang bekerja secara efisien dan efektif.

Birokrasi adalah organisasi yang membantu masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien.

Pendukung makna positif ini adalah Max Weber dan Harold Laski.

2. Makna Negatif

Yaitu organisasi birokrasi dikatakan sebagai organisasi yang penuh dengan patologi (penyakit) dan juga birokrasi adalah alat penguasa untuk menindas rakyatnya, yang berarti harus selalu tunduk dan patuh pada penguasa dan tidak perlu memperhatikan rakyatnya.

Oleh karena birokrasi dipandang tidak bermanfaat bagi rakyat, bahkan merugikan rakyat. Pendukung makna negatif ini adalah Karl Max dan Hegel.

3. Makna Netral (*value free*)

Yaitu keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif atau setiap organisasi yang berskala besar yang pegawainya digaji oleh pemerintah (Negara).

Birokrasi dipandang sebagai organisasi yang menjalankan pekerjaan teknis administrative dari kehidupan pemerintah (Negara).

Pendukung dari makna netral ini adalah generasi Martin M. Blau, dll.

Berdasar pada ketiga makna tersebut di atas, tentunya birokrasi masa depan haruslah yang bermakna positif, atau paling tidak bermakna netral.

Oleh karena itu sangatlah dihindari dan dijauhi birokrasi yang bermakna negatif. Sehingga hubungan antara masyarakat dan birokrasi harus tercipta hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan karena memang keduanya sama-sama membutuhkan.

Bagaimana agar hal itu bisa tercapai? Sebuah ide tentang birokrasi masa depan bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Perubahan pelayanan kepada masyarakat.

Kedepan, keberanian masyarakat untuk menuntut haknya semakin jelas.

Oleh karena itu perubahan anggapan kepada masyarakat sebagai konsumen yang harus dilayani, tidak bisa ditunda lagi.

Pelayanan kepada masyarakat harus kepada pelayanan yang bersikap ramah, terbuka terhadap kritik, dan tidak pilih-pilih (tidak membedakan masyarakat dari penampilannya atau karena kenal/tidak kenal).

2. Birokrasi harus bekerja dengan bertanggung jawab atau mengutamakan akuntabilitas.

Seseorang dikatakan bertanggung jawab, ketika dia mampu menyelesaikan tugas dengan baik tanpa cela.

Mampu menyelesaikan tugas dengan baik berarti pula dia mampu bekerja secara cepat (sesuai waktu yang

ditentukan) dan tepat (tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, yang dalam bahasa Jawa disebut *bener lan pener*).

Artinya, seorang birokrat dikatakan bekerja dengan bertanggung jawab sudah mampu melaksanakan tugas dengan baik, dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Kepada masyarakat mampu melayani dengan baik seperti poin 1 di atas;
- 2) Kepada atasan, mampu menunjukkan prestasinya tanpa diembel-embeli dengan cara-cara yang tidak etis, misalnya suap, sogok, "mencari muka", atau menerapkan slogan asal bapak senang (*abs*);
- 3) Kepada teman-teman sejawat atau partner kerjanya, mampu menjalin hubungan atau relationship dengan baik, yaitu bersaing dalam pekerjaan secara fair, tidak suka menfitnah, tidak menelikung dari belakang prestasi teman, mudah meminta maaf dan memaafkan, dan sebagainya;
- 4) Kepada pekerjaannya, tidak menganggapnya sebagai beban tetapi sebagai sebuah amanah yang diberikan kepadanya sehingga merupakan ibadah yang apabila dilaksanakan dengan baik akan mendapat pahala, dan apabila tidak melaksanakan dengan baik atau mengabaikannya akan mendapat hukuman atau masuk neraka;
- 5) Mensyukuri atas nikmat yang diberikan kepada allah swt.
 - a. Posisi sebagai pegawai negeri sipil (*pns*) adalah posisi yang diidam-idamkan banyak orang.
 - b. Kita sering menyaksikan di media massa, banyak antrian masyarakat yang ingin mendaftar sebagai *pns*.

c. Dan kalau sudah diterima menjadi pns, harus mewujudkan rasa syukur itu dengan ibadah;

6) Berkaitan dengan posisinya sebagai pns, maka memang diawali perjuangan do'a.

Para birokrasi itu harus dilihat dulu bagaimana proses rekrutmen ketika dia masuk menjadi PNS.

Apakah murni berdasarkan hasil tes tertulis dan tes wawancara, atau karena menggunakan cara pintas dengan menyogok kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kalau proses rekrutmen itu dasarnya adalah kejujuran atau murni karena kapabilitas dia, maka tentunya kinerjanya juga pasti akan bagus.

Tetapi sebaliknya, apabila proses rekrutmennya sudah cacat, maka kinerjanya juga pasti akan cacat atau banyak masalah.

3. Seluruh anggota organisasi harus tangguh menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal.

Negara dan bangsa ini membutuhkan orang-orang yang tangguh dan kuat dalam segala hal, bukan yang lemah, lembek, dan tidak kuat iman.

Karena kondisi bangsa saat ini sudah sangat memprihatinkan, sehingga perubahan dalam organisasi birokrasi adalah suatu keniscayaan.

Yang dimaksud tangguh secara internal adalah tangguh dalam hal motivasi dan keinginan yang datang dari dalam diri sendiri.

Motivasi untuk maju, berkembang, beribadah, bekerja dengan baik, harus tangguh.

Artinya, tidak gampang terpengaruh oleh teman sekantornya untuk bekerja semaunya sendiri, sering mbolos, mangkir, dan sebagainya.

Tangguh dalam hal keinginan adalah keinginan untuk hidup santai, tidak rekasa, bergelimang kemewahan, dan sebagainya. Karena pada akhirnya keinginan-keinginan itu hanya bermuara pada satu hal yaitu korupsi. Keinginan untuk hidup enak dan bergelimang kemewahan tidak mungkin dinikmati oleh PNS jika hanya mengandalkan dari gaji semata meskipun sudah ditambah dengan remunerasi. Padahal carut marutnya, amburadulnya organisasi birokrasi saat ini sebab utamanya adalah korupsi. Oleh karena itu ketangguhan dari keinginan untuk korupsi amat sangat dibutuhkan. Sedangkan tangguh secara eksternal adalah tangguh terhadap terpaan godaan dari luar. Ketika masyarakat sudah semakin pandai, tentunya semakin berani pula mereka dalam menuntut haknya.

Penyampain kritik yang sebelumnya masih dengan bahasa yang sopan dan hati-hati, sekarang menjadi lebih lugas dan tegas. Tahan terhadap kritik adalah ketangguhan yang harus dimiliki oleh birokrat. Bukan dibalas dengan kemarahan dan membalas dendam dengan pelayanan yang semaunya sendiri. Tiga hal di atas apabila dilaksanakan dengan baik, niscaya akan membawa pada hubungan simbiosis mutualisme seperti yang sudah disebut di atas. Masyarakat puas dengan kinerja birokrasi dan sebaliknya anggota birokrasi akan mampu bekerja dengan baik tanpa direpoti dengan kritik, hujatan, dan demo-demo yang tak habis-habisnya.

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS



Monica Feronica Bormasa, S.Sos.,M.Si

Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lelemuku Saumlaki

Penulis lahir di Larat, 13 November 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki, dan melanjutkan S-2 pada Universitas 45 Makassar. Penulis pernah menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki sejak tahun 2015-2022, dan pada saat ini penulis menjadi dosen pada Universitas Lelemuku Saumlaki. Penulis pernah menjabat sebagai Kepala LPM STIA Saumlaki tahun 2015-2017, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Niaga tahun 2017-2019, dan Wakil Ketua II STIA Saumlaki tahun 2019-2020.

BIODATA PENULIS



Ahmad Rosandi Sakir, S.IP.,M.AP

Dosen ASN Pada Universitas Pattimura

Penulis lahir di Tanjonge, Sebuah Desa di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. Besar dan Sekolah di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Merupakan Anak Pertama Dari Pasangan H.M.Sakir dan Hj. Rosmini. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Hasanuddin pada tahun 2017 dan Melanjutkan Studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin dan menyelesaikan pendidikan pada Tahun 2021. Menjadi Dosen pada pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17-8-1945 Makassar pada tahun 2021 dan selanjutnya Menjadi Dosen ASN Pada Universitas Pattimura pada tahun 2022

BIODATA PENULIS



Ahmad Mustanir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Lahir di Rappang (Kab. Sidenreng Rappang, SulSel) 06 Januari 1974. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah Palu Tahun 1980, SD Negeri 6 Rappang dan SD Negeri 3 Palu Tahun 1986, SMP Negeri 3 Toli-Toli Tahun 1989, SMA Negeri 1 Toli-Toli dan SMA Negeri 8 Makassar Tahun 1992, S1 Fisip UNHAS Tahun 1997 Prodi Ilmu Politik. S2 UNHAS Tahun 2003 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNM Makassar.

Pengalaman kerja – Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud

Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 40-an Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki lebih dari 80-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat - Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Hibah PKM & PKMS Kemendikbud Ristek/ Kemenristek dikti dan Hibah internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuwan dan masuk dalam Rangkaing Scientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1 tepatnya urutan 134. Saat ini menempati peringkat 70 SINTA versi 3 years dari 255.279 dosen/peneliti tingkat Nasional H-Index 37, i10-Index 63.

Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia. Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu

Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027 serta Dewan Pakar IKA UNHAS Sidrap 2022-2026.

Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

SCOPUS ID : 57222904488 (*H-index : 1, G-index : 1, i10-index : 0*)

Google Scholar ID : srl7FjoAAAAJ (*H-index : 37, G-index : 1, i10-index : 63*)

Wos ResearcherID : R-6549-2016 (*H-index : 1, G-index : 2, i10-index : 0*)

SINTA Author ID : 6007675 (*Sinta score 3years : 903, allyears : 4.604*)

NIDN : 0906017401

ORCID : 0000-0002-4029-5507

Publons : 1757210

LinkedIn : 68002a179

OSF : k7dfm

Garuda ID : 1235035

AD Scientific Index ID: 303716

ResearchGate :

<https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Mustanir>

Personal Website :

<https://belajarbarengahmad.wordpress.com/>

BIODATA PENULIS



Nur Rohim Yunus

Dosen Bidang Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Nur Rohim Yunus adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999) & ISID (2002). Meraih gelar Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan dan Program Doktor (Ph.D) di GUU (Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya) Moscow Russia.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif juga dalam kegiatan organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Russia sebagai dewan pakar, anggota APHAMK Jakarta, anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jakarta, anggota ADI (asosiasi Dosen Indonesia), anggota HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), pembimbing MCC (Moot Court Community) UIN Jakarta.

BIODATA PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Dosen Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 - 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 - sekarang. Bersama kawan-kawan penulis

menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301

BIODATA PENULIS



Dr. Neng Suryanti Nengsih, S.Sos., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang

Penulis lahir di Tembilahan, Inderagiri Hilir pada tanggal 12 Desember 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, melanjutkan S2 pada Universitas Padjadjaran Bandung dengan mengambil konsentrasi bidang kajian utama (BKU) Ilmu Pemerintahan, dan kembali melanjutkan pada program pendidikan Doktorat (S3) pada Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis mengawali karir sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu sosial dan Ilmu Politik Raja Haji dimulai pada tahun 1999 sampai sekarang.

BIODATA PENULIS



Amtai Alaslan, S.IP.,M.Si.
Fakultas Ilmu Sosial Humaniora
Universitas Lelemuku Saumlaki

Penulis dengan sapaan akrab Bung Allan, Lahir di Latdalam Pada tanggal 18 Juni 1985. Lulus Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dari STPMD "APMD" Yogyakarta Tahun 2008. Mendapatkan gelar Master Ilmu Pemerintahan (M.Si) dari Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Alamater yang sama Tahun 2011. Penulis sudah menjadi dosen tetap sejak tahun 2008 hingga sekarang dan saat ini dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA) priode 2023-2026. Penulis telah menerbitkan beberapa buku antara lain **FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK: Studi Relokasi Pasar** (Pena persada) tahun 2021, Buku **Metode Penelitian Kualitataif** (Rajawali Pers) tahun 2022 dan **Book Chapter Metode Penelitian Ilmu Sosial** (Penerbit Widina) tahun 2022, Kemudian **Book Chapter Etika Bisnis, Book Chapter Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi** dan **Book Chapter Manajemen Strategis** tahun 2023. Selain itu Penulis juga aktif

dalam menulis dan mempublikasikan arikel ilmiah pada berbagai jurnal nasional yang terakreditasi.

BIODATA PENULIS



Dr. Sunariyanto, S.Sos.,MM

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIA dan Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Sunariyanto, Lahir di Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, 10 Oktober 1968. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAG Banyuwangi (1997), Strata Dua (S2) diselesaikan pada Jurusan Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Sumberdaya Manusia Pascasarjana Universitas Wijaya Putra Surabaya (2022), dan menyelesaikan studi Strata Tiga (S3) pada Program Doktor Ilmu Administrasi dengan minat Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2011). Penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIA dan Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Malang. Bidang kajian yang ditekuni adalah Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, dan Ilmu Administrasi. Buku yang pernah ditulis: 1. KEBIJAKAN PUBLIK: TEORI, FORMULASI DAN APLIKASI (2023); 2. MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK (2023);